

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KEMAMPUAN
APARATUR DESA TERHADAP EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Diajukan Oleh:

SYARIFUDDIN
2019.MM.1.2377

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KEMAMPUAN
APARATUR DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

Oleh

SYARIFUDDIN
2019MM12377

Telah dipertahankan didepan Penguji Pada Tanggal 27 Mei 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat



Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A

Dr. M. Salim Sultan., M.M

Mengetahui:

Direktur PPS
STIE Nobel Indonesia

Dr. Maryadi, S.E., M.M

Ketua Program Studi
Magister Manajemen

Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A

**HALAMAN IDENTITAS
MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI**

JUDUL TESIS :

***PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KEMAMPUAN
APARATUR DESA TERHADAP EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG***

Nama Mahasiswa : SYARIFUDDIN
NIM : 2019MM12377
Program Studi : Magister Manajemen
Peminatan : Manajemen Pemerintahan Daerah

KOMISI PEMBIMBING:

Ketua : Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., CA
Anggota : Dr. Salim S S.E., M.M.

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Dr. Maryadi, S.E., M.M.
Dosen Penguji 2 : Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M

Tanggal Ujian : 27 Mei 2021
SK Penguji Nomor : 27/SK/PPS/STIE-NI/IV/2021

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Mei 2021



SYARIFUDDIN
2019.MM.12377

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dihanturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KEMAMPUAN APARATUR DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG”** dapat diselesaikan. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nobel Indonesia Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan dan pembahasannya juga menyadari bahwa penulisan ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar.
2. **Dr. Maryadi, S.E., M.M.** selaku Direktur Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
3. **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak.,C.A** selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
4. **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak.,C.A** selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan **Dr. M. Salim Sultan, S.E., M.M.** selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah

bersedia membimbing, menyumbangkan masukan dan saran serta kritikan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

5. Keluarga yang tercinta yang senantiasa memberikan dukungan do'a, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama kuliah sampai penulisan tesis ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
6. Para sahabat yang telah memberikan bantuan pemikiran serta saran yang luar biasa sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen, serta staf Program Pascasarjana Program Studi Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar, atas bantuan yang telah di berikan selama ini, kiranya akan menjadi bekal hidup dalam mengabdikan ilmu saya dikemudian hari.
8. Teman sejawat mahasiswa prodi Magister Manajemen PPs STIE Nobel Indonesia Makassar atas bantuan dan kerja samanya selama ini. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan yang diberikan hingga penulisan tesis ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dengan harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di bidang manajemen dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. Amin.

Makassar, Mei 2021

Peneliti

SYARIFUDDIN

ABSTRAK

Syarifuddin. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, dibimbing oleh Sylvia Sjarlis dan Salim Sultan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey yang dilakukan di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada bulan Mei 2021. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung dan menggunakan sampel 33 Aparatur Desa yang bekerja di kantor desa pada Lingkup Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan teknik sampling jenuh. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 1, 2, dan 3.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa bahwa tiga variabel secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa. Variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kemampuan Aparatur Desa, Pengelolaan Dana Desa



ABSTRACT

Syarifuddin. 2021. *The Effect of Accountability, Transparency and Ability of Village Apparatus on Effectiveness of Village Fund Management in Alla Subdistrict, Enrekang Regency, supervised by Sylvia Sjarlis and Salim Sultan.*

This study aims to determine and analyze the Effect of Accountability, Transparency and Ability of Village Apparatus on the Effectiveness of Village Fund Management in Alla Subdistrict, Enrekang Regency.

This research approach uses survey research conducted in several villages in Alla District, Enrekang Regency in May 2021. The data used in this study is primary data collected through a direct questionnaire survey and using a sample of 33 Village Apparatus who worked in the village office in Scope of Alla District, Enrekang Regency. Determination of the sample in this study with saturated sampling technique. Data analysis used multiple linear regression analysis to test hypotheses 1, 2, and 3.

The results of the study using multiple linear regression analysis showed that three variables significantly influenced the management of village funds, namely Accountability, Transparency and Ability of the Village Apparatus. The variables of Accountability, Transparency and Ability of the Village Apparatus simultaneously affect the management of village funds. Transparency is the most influential variable on the management of village funds.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Apparatus Ability, Village FundManagement*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Akuntabilitas	12
2.3. Transparansi	22
2.4. Kemampuan Aparatur Desa	28
2.5. Pengelolaan Dana Desa	32
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
3.1. Kerangka Konseptul	45
3.2. Hipotesisi Penelitian	48
3.3. Definisi Operasional Variabel	48
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Pendekatan Penelitian	51
4.2. Tempat dan Waktu Penelitian	51
4.3. Aparatur Desa / Populasi dan Sampel	52
4.4. Jenis dan Sumber Data	52
4.5. Teknik Pengumpulan Data	53
4.6. Instrumen Penelitian	53
4.7. Skala Penelitian Variabel	55
4.8. Tekhnis Analisis data	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Deskripsi Responden dan Variabel Penelitian	59
5.1.1 Karakteristik Responden.....	59
5.1.2 Analisis Statistik Pernyataan.....	63
5.2 Hasil Uji Kualitas Data.....	70
5.2.1 Uji Validitas	70
5.2.2 Uji Reliabilitas	75
5.3 Pengujian Asumsi Klasik	76

5.4 Analisis Regresi Data Penelitian.....	79
5.4.1 Uji Parsial (T)	80
5.4.2 Uji Simultan(Uji F)	82
5.4.3 Uji Kesesuaian Model	83
5.5 Pengujian Hipotesis	83
5.6 Pembahasan.....	85
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	92
6.2 Saran-Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN – LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 : Tingkat Pengembalian Kuesioner	59
Tabel 5.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 5.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	61
Tabel 5.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	62
Tabel 5.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	63
Tabel 5.6 : Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	64
Tabel 5.7 : Ikhtisar Rentang Skala Variabel	65
Tabel 5.8 : Pernyataan Responden Mengenai Akuntabilitas.....	66
Tabel 5.9 : Pernyataan Responden Mengenai Transparansi	67
Tabel 5.10 : Pernyataan Responden Mengenai Kemampuan Aparatur Desa	68
Tabel 5.11 : Pernyataan Responden Mengenai Pengelolaan Dana Desa	69
Tabel 5.12 : Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_1)	70
Tabel 5.13 : Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X_2)	71
Tabel 5.14 : Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Aparatur Desa (X_3)	72
Tabel 5.15 : Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)	74
Tabel 5.16 : Hasil Uji Reliabilitas	76
Tabel 5.17 : Hasil Uji Multikolinearitas	78
Tabel 5.18 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	80
Tabel 5.19 : Hasil Uji F – Uji Simultan	82
Tabel 5.20 : Hasil Uji T Hitung	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Rerangka Pikir	47
Gambar 5.1 : Hasil Uji Normalitas – <i>Normal Probability Plot</i>	77
Gambar 5.2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN 2: KUESIONER PENELITIAN

LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI PENELITIAN

LAMPIRAN 4: HASIL ANALISIS DATA

1. UJI VALIDITAS

2. UJI RELIABILITAS

3. ANALISIS DESKRIPTIF

4. ASUMSI KLASIK

1) UJI NORMALITAS

2) UJI HETEROKEDASTISITAS

3. UJI MULTIKOLINIERITAS

5. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

LAMPIRAN 5: HASIL TABULASI DATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa

memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa harus mampu memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah

satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi

individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2018). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili

masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri, 2017). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejangalan-kejangalan dalam penerapannya.

Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika- dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur desa. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagdo, Widodo, dan Ismail pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul “Sistem Akuntansi Dana Desa”. Menemukan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 . Disamping itu

juga diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program Dana Desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngongare pada Tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh satu kecamatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah desa. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kartika, pada Tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja”. Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip *value of money*

belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.

Pemerintah Desa di Kecamatan Alla selama ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih masa pandemi Covid-19. Upaya-upaya dilakukan Pemerintah Desa di Kecamatan Alla salah satunya melalui pencairan dana desa yang bersifat stimulus agar penerima bantuan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pentingnya dilaksanakan kegiatan ini agar penerima bantuan dan desa mampu mengalokasi anggaran sesuai peruntukan, terutama kegiatan padat karya, sehingga apa yang diharapkan mampu diterjemahkan masing-masing kepala desa agar kelak tidak terjadi penyimpangan, yang pada akhirnya berujung di jeruji besi.

Pemerintah Desa di Kecamatan Alla Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19, BLT diserahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dikonsumsi di pandemi bisa ada dorongan untuk bisa menyambung rasa masyarakat kalangan bawah keluarga-keluarga sejahtera di Kecamatan Alla. Memang siapapun tidak menginginkan berurusan dengan aparat hukum, namun bagaimana agar tidak terjerat hukum tentunya apa yang menjadi rencana harus disesuaikan dengan kenyataan.

Pemerintah Desa di Kecamatan Alla dalam penyaluran dana desa merupakan kerja keras para kepala desa untuk mendukung program yang disesuaikan dengan rencana, sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat tercapai. Memang apapun bentuk bantuan yang digelontorkan, tentunya diperlukan koordinasi dan komunikasi agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok-pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas, transparansi dan kemampuan aparatur desa berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?
2. Apakah akuntabilitas, transparansi dan kemampuan aparatur desa berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?
3. Variabel apakah yang dominan berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kemampuan aparatur desa secara parsial terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang .
2. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kemampuan aparatur desa secara Simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
3. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan berguna dalam aspek teoritis, praktis sebagai berikut:

1.Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan

perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan kemampuan aparatur desa. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu tentang Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain :

1. Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016 melakukan penelitian dengan judul “Sistem Akuntansi Dana Desa”. Menemukan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 . Disamping itu juga diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program Dana Desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap Dana Desa.

2. Ngongare, 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh satu kecamatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah desa. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik.
3. Kartika, 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja”. Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator

akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip *value of money* belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.

4. Rahayu, 2017 melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang”. Hasil dari analisis dan pembahasannya bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Kaliyen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur saja. Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.

2.2. Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Suharto dalam Ngongare (2016), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

Menurut Mardiasmo (2016), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*contro*) sebagai bagian penting dalam menejemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan

pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2016) , yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1) Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan

kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2016) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau

tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

- 4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2016) sebagai berikut :

- 1) Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

- 2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ihyaul Ulum (2018) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian.

Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,

- 3) Undang-undang APBN,
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu tanggungjawab yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni *Amanah* dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana tanggungjawab dari teori agensi menekankan tanggungjawab pada agen (pelaksana).

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk

mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

2. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat padaakhir

Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
----	-----------

1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa taransparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2016), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2017), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2017), yaitu:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.

- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

3. Indikator Transparansi

Menurut Andrianto (2017), bahwa indikator transparansi terdiri dari :

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisik.
 - c) Adanya basis legal untuk pajak.
 - d) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas darimasing-masing tingkat pemerintahan.

2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - a) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (pros es penganggaran).
 - b) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
 - c) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisik.
 - e) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.

3. Adanya audit independen dan efektif
 - a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.

- c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- a) Adanya keterburukan informasi selama proses penyusunan anggaran.
- b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

No.	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh

	masyarakat.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka Transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen (Mardiasmo, 2016) yaitu :

1. Sistem perencanaan strategik

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu

organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.

2. Sistem pengukuran kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

3. Sistem pelaporan keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

4. Saluran akuntabilitas publik

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

5. Auditing sektor publik

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

2.4 Kemampuan Aparatur Desa

Pengertian dan arti Kemampuan atau kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan atau *job tasks*. Sedangkan menurut Armstrong, menyatakan bahwa kompetensi adalah dimensi tindakan dari tugas, dimana tindakan tersebut dipakai oleh karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan memuaskan dan apa yang diberikan karyawan dalam bentuk yang

berbeda-beda dan tingkatan kinerjanya. Akan tetapi Mc Clelland mengatakan bahwa kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada suatu situasi tertentu. Namun demikian, pendapat ahli lainnya mengatakan bahwa kompetensi berhubungan dengan sikap, watak kepribadian dan pengetahuan yang diperolehnya Kompetensi individu.

Tujuan kebutuhan dalam penentuan tingkat atau level kompetensi seseorang hanyalah untuk mengetahui tingkat kinerja orang tersebut apabila ia akan melakukan suatu pekerjaan, apakah hasilnya mereka nanti termasuk dalam kategori tinggi atau dibawah rata-rata. Kemampuan atau kompetensi seseorang termasuk dalam kategori tinggi atau baik nantinya akan dibuktikan dan ditunjukkan, apabila ia sudah melakukan pekerjaan (sudah bekerja). Sebaliknya, apabila mempunyai kompetensi tingkat rendah ia akan cenderung berkinerja rendah pula. Dalam setiap individu seseorang terdapat beberapa karakteristik kompetensi dasar, yang terdiri atas berikut ini:

- Watak (*traits*), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri (*self confidence*), kontrol diri (*self control*), ketabahan atau daya tahan(*hardiness*).
- Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang

mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.

- Bawaan (*self concept*) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai tersebut dapat diukur melalui tes untuk mengetahui nilai (*value*) yang dimiliki, apa yang menarik seseorang untuk melakukan sesuatu.
- Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau pada areatertentu.
- Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Dalam kompetensi individu ini dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu terdiri atas: kompetensi *threshold* atau dapat disebut kompetensi minimum yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang, misalnya kemampuan pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan membaca dan menulis, dan kompetensi *differentiating* yaitu kompetensi yang membedakan seseorang berkinerja tinggi atau berkinerja rendah dengan karyawan lainnya, misalnya seseorang yang memiliki orientasi motivasi tinggi biasanya yang diperhatikan adalah pada tujuan melebihi apa yang ditargetkan oleh perusahaan dalam standar kerja.

- **Kompetensi jabatan**

Kompetensi jabatan (*job competency*), mempunyai peran yang sangat penting dan harus mendapat perhatian serius dari pihak

manajemen karena aspek kompetensi jabatan ini sudah banyak digunakan sebagai dasar penentu posisi jabatan calon karyawan atau calon pejabat yang akan menduduki suatu jabatan.

Seseorang agar mendapatkan kinerja tinggi secara maksimal seharusnya antara kompetensi individu yang dimiliki, harus sesuai atau cocok dengan dengan kompetensi jabatan yang diembannya, hal ini akan mengakibatkan atau terjadi kecocokan (*matching*) dan kesesuaian dengan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan standar kompetensi pada kompetensi jabatan, tercakup dua komponen yang mendasar, yaitu kompetensi utama dan kompetensi pendukung, rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kompetensi utama, merupakan kompetensi yang harus dimiliki seseorang berkaitan dengan suatu jabatan atau tugas pekerjaan pada lingkup tertentu, agar pelaksanaan jabatan tersebut berhasil dengan baik, maka harus meliputi berikut ini:
 1. Akuntabilitas
 2. Organisasi pembelajar
 3. Menentukan masalah dan memecahkannya
 4. Manajemen perubahan
 5. Perencanaan stratejik
 6. Manajemen kebijakan

7. Manajemen kinerja (*management for result*)
 8. Manajemen kualitas pelayanan
 9. Manajemen kerjasama
- Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diperlukan untuk membantu atau mendukung terwujudnya pelaksanaan jabatan tertentu, yang terdiri atas:
 - Komunikasi Teknologi informasi

2.5 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara propesional.

2.5.1 Desa

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.5.2 Pendapatan Dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - a) Hasil usaha deasa antara lain : hasil Bumdes, tanah kas desa.

b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Desa (ADD);
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana

dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas :

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiapbulan.

b) Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain : (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun

Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c) Belanja modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) Belanja Tak Terduga.

2.5.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap

belanja, penghematan belanja, dan sisa dan akegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk :

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila raelisasi pendapatan lebihkecil daripada belanja;
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahunanggaran belum diselesaikan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggrkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat :

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari danacadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) Sumber dana cadangan;
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2.5.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesaranya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain :

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.

- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor.
- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- i. Uang kehormatan BPD.
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagamaan.
- h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- i. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
- m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.

- n. Pembinaan RT dan RW.
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Tahapan pengelolaan ADD di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam

pengelola ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1) Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

2) Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirimke Kecamatan.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Nasirah (2016)

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

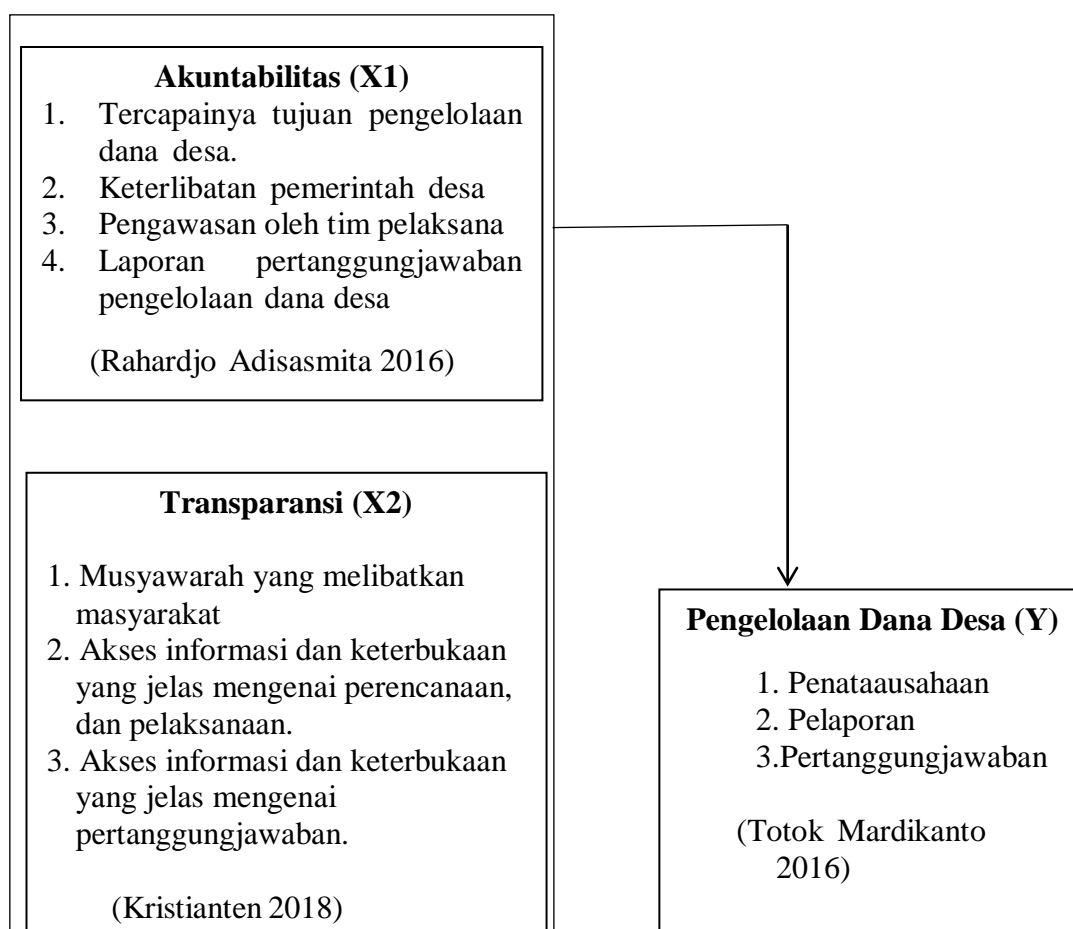
Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

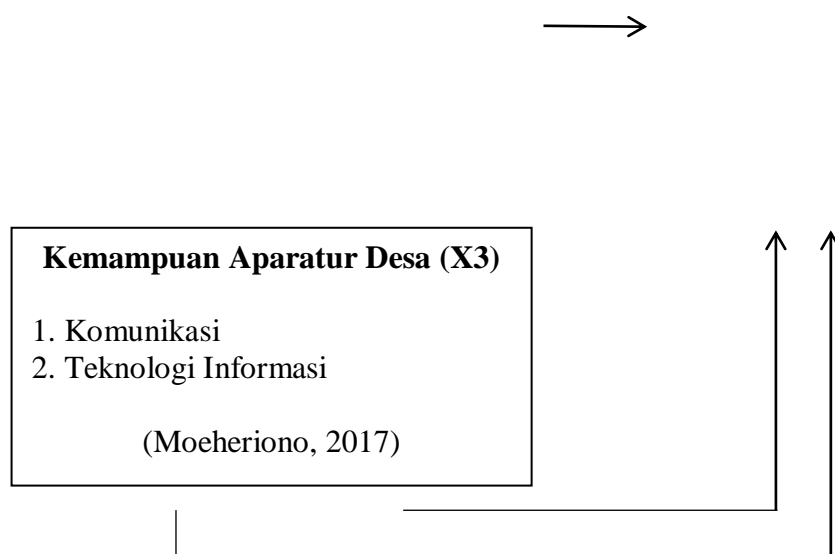
Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2016), transparansi berarti

keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya. Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.





Gambar 3.1.

Kerangka Konsep Penelitian

3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perumusan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiono, 2018). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, Transparansi, dan Kemampuan Aparatur Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

2. Akuntabilitas, Transparansi, dan Kemampuan Aparatur Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

3. Variabel yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Untuk menjelaskan variable yang dimaksud dalam penelitian ini maka diperlukan definisi operasional variabel sebagai berikut:

a. Variabel bebas/ Independen (X)

1. Akuntabilitas (X_1) adalah Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. (Raharjo Adisasmita, 2016) Indikator Akuntabilitas dalam penelitian ini:

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
- b. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaandana desa.
- c. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
- d. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan danadesa.

2. Transparansi (X_2) adalah Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk

mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup masyarakat.

(Kristianten 2018) Indikator Transparansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- b. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.
- c. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

3. Kemampuan Aparatur Desa (X3) didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

(Moeheriono, 2017) Indikator Kemampuan Aparatur Desa dalam penelitian ini adalah:

- a. Komunikasi
- b. Teknologi Informasi

b. Variabel Terikat/ Independen (Y)

Adapun variabel terikat dalam penilaian itu adalah Pengelolaan Dana Desa yang dimaksud Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Totok Mardikanto 2016). Indikator dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penatausahaan
- b. Pelaporan
- c. Pertanggungjawaban

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survei yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2017). Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Penelitian survey dapat digunakan untuk maksud penjajakan (*eksploratif*), dan penjelasan (*explanatory*) yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi atau meramal akan kejadian tertentu di masa yang akan datang penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial.

Survei dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk menyelidiki mengenai pengaruh variabel Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, sehingga dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada beberapa Kantor Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Mei 2021.

4.3. Aparatur Desa

4.3.1 Populasi

51

Menurut supomo, populasi adalah sekelompok orang, kejadian, maupun segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Masalah

populasi timbul terutama pada penelitian opini yang menggunakan metode *survey* sebagai teknik pengumpulan data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, yang meliputi Kepala Desa sebanyak 5 orang, Sekretaris Desa sebanyak 5 Orang, Kaur Perencanaan sebanyak 5 orang, Kaur Keuangan sebanyak 5 orang, Kasi pemerintahan sebanyak 5 orang, Kasi pembangunan 5 orang dan Kasi Kesra sebanyak 5 orang. Jadi total populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 orang.

4.3.2 Sampel

Supomo juga mengemukakan pendapat bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur desa dan beberapa warrga desa. Peneliti menggunakan teknik *sampling* ini karena terbatasnya tenaga, dan juga tidak memungkinkannya pengambilan data secara keseluruhan, sampel dari penelitian ini sebanyak 35 responden, dan secara pelaksanaan dapat dilaksanakan sebanyak 35 responden. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 responden ($n=35$). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan sengaja dengan syarat telah memenuhi segala persyaratan yang telah dibutuhkan.

4.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden yang terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan dan wawancara.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, majallah, dan juga internet untuk mendukung penelitian ini.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Daftar pertanyaan (Kuisisioner)

Teknik yang digunakan angket atau kuisisioner dalam suatu cara pengumpulan data dengan memberikan dan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka dapat memberi respon atas daftar pertanyaan tersebut. Jawaban tersebut selanjutnya diberi skor dengan skala *Likert*.

b. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara meninjau, membaca dan mempelajari berbagai macam buku, jurnal, dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

4.6. Instrumen Penelitian

4.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi pemilihan pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dua alat untuk mengukur kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran yang tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrument yang valid dan sah mempunyai validitas yang tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya.

Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung yang menggunakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari *r*-tabel pada signifikansi 0,05 (5%) Ghozali 2011.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *repeated measure* (pengukuran ulang) dan *one shot* (pengukuran sekali saja). Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar pernyataan lain. Menurut Ghozali (2013) untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik *Cronbach Alpha*, reliabilitas suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila nilai koefisien *Cronbach Alpha* yang diperoleh $> 0,60$.

4.6.2. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample test dan ANOVA.

b. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.

4.6.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Uji auto korelasi di gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

b. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.

4.7. Skala Penilaian (Rating Scale) Variabel

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* sebagai alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2018). Peneliti memberikan lima alternative jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk keperluan

analisis kuantitatif penelitian, dengan alternative jawaban sangat setuju (SS) skor 5, setuju (S) skor 4, Ragu-ragu (R) skor 3, Tidak setuju (TS) skor 2 dan sangat tidak setuju (STS) skor 1.

4.8. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa. Dalam analisis ini digunakan bentuk table dan nilai rata –rata untuk memperjelas deskripsi variabel.

Teknik analisa data kuantitatif yang di peroleh dari hasil kuesioner dengan menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple regression analiysis*). Analisis linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang ditunjukkan oleh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel dependen (Y) yang di tunjukkan oleh Pengelolaan Dana Desa. Sebelum melakukan pengujian regresi berganda syarat uji regresi yang harus di penuhi.

Bentuk umum dari model yang akan di gunakan adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y= Pengelolaan Dana Desa

A =Konstanta

X₁= Akuntabilitas

X₂= Transparansi

X₃= Kemampuan Aparatur Desa

e = Kesadaran Prediksi

Kemudian untuk mengetahui Akuntabilitas (X1), Transparansi ,(X2), Kemampuan Aparatur Desa (X3), Terhadap Variabel Terkait yaitu Pengelolaan Dana Desa (Y) , Secara Parsial maka dilakukan uji t. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu : Akuntabilitas (X1), Transparansi ,(X2), Kemampuan Aparatur Desa (X3) terhadap

variabel terkait yaitu Pengelolaan Dana Desa (Y) secara bersama-sama, maka dilakukan uji F.

a. Pengujian Hipotesis pertama,

Hipotesis tersebut akan di uji berdasarkan pada analisis di hasilkan dari model regresi berganda.

- a) Ho berarti, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b) Ha berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c) Dengan tingkat signifikan $\alpha=5\%$ dan dengan *degree of freedom* $(n-k-1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k tabel di tentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% dan $df = (n-1)$ (Ghozali, 2011)

b. Pengaruh hipotesis kedua

Pengujian hipotesis ini di gunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut:

- a) Ho: berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Ha: berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan $\alpha=5\%$ dan dengan *degree of freedom* (k) dan $(n-k-1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka nilai F hitung dirumuskan n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka nilai F hitung di rumuskan sebagai berikut.

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Dimana:

$R^2 = R$ Square

n = Banyaknya Data

k = Banyaknya variable indeviden

Sedangkan F tabel di tentukan dengan melihat tingkat signifikan a sebesar 5% dan $df = (n-1)$, sehingga (Ghozali, 2011)

a) Jika F hitung > tabel atau Sig F 5% maka H_0 di tolak dan H_1 di terima yakni secara simultan variabel indeviden berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) Jika F hitung < atau Sing F > 5 % maka% H_0 diterima dan H_1 di tolak yakni secara simultan variabel indeviden tidak berpengaruh signifikan terhadap varibel dependen.

c. Pengujian Hipotesis ketiga

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji variabel – variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Apabila diantara variabel – variabel indeviden yang mempunyai nilai koefisien regresi (R) lebih besar diantara yang lainnya maka variabel tersebut merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Responden dan Variabel Penelitian

5.1.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan sengaja dengan syarat telah memenuhi segala persyaratan yang telah dibutuhkan.

Peneliti menyebarkan 35 kuesioner, tetapi hanya 33 kuesioner yang dapat dijadikan data penelitian. Tingkat pengembalian (response rate) sebesar 94 % dikarenakan 1 kuesioner tidak kembali dan 1 kuesioner tidak diisi dengan lengkap, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data penelitian.

Tabel 5.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	35	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	1	3 %
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	1	3 %
Kuesioner yang dapat diolah	33	94 %

Sumber: Data primer tahun 2021, diolah

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja di lingkungan kerja masing-masing dalam wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 responden (63,6%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 responden (36,4%).

Tab 59
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	21	63.6	63.6	63.6
Perempuan	12	36.4	36.4	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 22

Dari tabel tersebut di atas, aparatur pemerintah desa lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan karena kita ketahui bahwa kondisi geografis desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Alla sebagian besar berada pada daerah dataran tinggi dan bergunung-gunung. Sehingga kalau ada kegiatan diluar atau peninjauan lapangan yang dilakukan oleh aparatur desa, maka dibutuhkan tenaga yang kuat dan prima. Maka tenaga yang kuat itu tentunya dimiliki oleh aparatur desa laki-laki dibandingkan dengan aparatur desa perempuan. Sama halnya bila melakukan kegiatan gotong – royong, khususnya pekerjaan yang berat yang membutuhkan tenaga, maka yang akan terlibat langsung didalamnya adalah aparatur desa laki-laki, sedangkan aparatur desa yang perempuan hanya melakukan pekerjaan yang ringan seperti menyediakan konsumsi.

b. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang berumur <25 tahun yaitu sebanyak 3 responden (9,1%), dilanjutkan dengan umur antara 25-30 tahun sebanyak 7 responden (21,2%), berumur antara 31-35 tahun sebanyak 8 responden (24,2%), berumur antara 36-50 tahun sebanyak 14 responden (42,4%), serta berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 1 responden (3%).

Tabel 5.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <25	3	9.1	9.1	12.1
25-30	7	21.2	21.2	33.3
31-35	8	24.2	24.2	57.6
36-50	14	42.4	42.4	100.0
>50	1	3.0	3.0	3.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 22

Dalam hal kemampuan aparatur desa dalam mengelolah anggaran dana desa, maka salah satu faktor pendukung adalah usia para aparatur desa itu sendiri. Dengan usia yang masih muda akan lebih cekatan dan tanggap dalam mengoperasikan teknologi atau aplikasi yang digunakan dalam laporan pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang masih muda tentunya memiliki daya ingat yang kuat dibandingkan dengan aparatur desa yang sudah tua.

c. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 13 responden (39 %), pendidikan S1 sebanyak 19 responden (58%), pendidikan D3 sebanyak 1 responden (3%). Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan S2 tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 5.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan Terakhir Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA/SMK	13	39.4	39.4	100.0

D3	1	3.0	3.0	3.0
S1	19	57.6	57.6	60.6
Total	33	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 22

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam pengelolaan dana desa. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, maka akan lebih mudah memahami daripada teknologi yang digunakan. Kita ketahui saat ini dalam membuat APBDes dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dari sini, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimiliki oleh aparatur pemerintah desa.

d. Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini telah bekerja selama <1 tahun sebanyak 0 responden (0 %), bekerja selama 1- 5 tahun sebanyak 8 responden (24,2 %), bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 14 responden (42,4 %), dan bekerja selama 10 tahun keatas sebanyak 11 responden (33,3%).

Tabel 5.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5	8	24.2	24.2	57.6
6 – 10	14	42.4	42.4	100.0
>10	11	33.3	33.3	33.3

Total	33	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Sumber: Output SPSS 22

Untuk efektifnya pengelolaan dana desa, maka seorang aparat desa harus memiliki pengalaman. Pengalaman itu diperoleh dari masa kerja yang dimiliki. Seorang aparat desa yang memiliki masa kerja lebih lama tentu memiliki pengalaman yang banyak pula khususnya dalam pengelolaan anggaran dana desa. Walaupun seorang aparat desa seorang sarjana tapi belum memiliki pengalaman maka akan kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Desa.

5.1.2 Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Variabel

Deskripsi variabel dari 33 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas (X1)	33	3.50	5.00	4.5833	.35171
Transparansi (X2)	33	4.17	5.00	4.7626	.22060
Kemampuan Aparatur Desa (X3)	33	4.33	5.00	4.7884	.17827
Pengelolaan Dana Desa (Y)	33	4.14	5.00	4.7835	.21165
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Output SPSS 22

Tabel 5.6 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel 5.6, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 3,50, nilai maksimum sebesar 5.00, mean (rata-rata) sebesar 4.5833 dengan standar deviasi sebesar 0.35171 yang artinya nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel transparansi menunjukkan nilai minimum sebesar 4.17, nilai maksimum sebesar 5.00, mean (rata-rata) sebesar 4.7626 dengan standar deviasi sebesar 0.22060 yang artinya nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Variabel kemampuan aparatur desa menunjukkan nilai minimum sebesar 4.33, nilai maksimum sebesar 5.00, mean (rata-rata) sebesar 4.7884 dengan standar deviasi sebesar 0.17827 yang artinya nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Variabel Pengelolaan Dana Desa menunjukkan nilai minimum sebesar 4.14 nilai maksimum sebesar 5.00, mean (rata-rata) sebesar 4.7835 dengan standar deviasi sebesar 0.21165 yang artinya nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

b. Analisis Deskriptif Pernyataan

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data. Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu :

$$c = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,8, dengan demikian rentang skala 0,8 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut:

Tabel 5.7
Ikhtisar Rentang Skala Variabel

Rentang	Akuntabilitas	Transparansi	Kemampuan Aparatur Desa	Pengelolaan Dana Desa
$1 \leq X < 1,80$	STS	STS	STS	STS
$1,80 \leq X < 2,60$	TS	TS	TS	TS
$2,61 \leq X < 3,50$	N	N	N	N
$3,51 \leq X < 5,20$	S	S	S	S
$5,21 \leq X < 5$	SS	SS	SS	SS

Keterangan : SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1) Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas (X_1)

Analisa deskripsi terhadap variabel disiplin yang terdiri dari 4 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai disiplin, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5.8
Pernyataan Responden Mengenai Akuntabilitas

Jawaban Responden	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot	1	2	3	4	5			
Item_1	F		1	25	7	33	4,18	S
	Skor		3	100	35	138		
	%		3	76	21	100		
Item_2	F		4	7	22	33	4,54	S
	Skor		12	28	110	150		

	%			12	21	67	100		
Item_3	F			1	3	29	33	4,85	S
	Skor			3	12	145	160		
	%			3	9	88	100		
Item_4	F				5	28	33	4,85	S
	Skor				20	140	160		
	%				15	85	100		
Rata-rata Keseluruhan								4.61	S

Sumber : Data primer tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel 5.8 dapat diketahui bahwa dari 33 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Akuntabilitas (X_1) berada pada daerah Setuju dengan skor 4,61. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap Akuntabilitas pada Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.

2) Analisis Deskriptif Variabel Transparansi (X_2)

Analisa deskripsi terhadap variabel Transparansi yang terdiri dari 6 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Transparansi, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5.9
Pernyataan Responden Mengenai Transparansi

Jawaban Responden	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Ket		
Bobot	1	2	3	4	5					
Item_1	F			1	1	31	33	4,90	S	
	Skor			3	4	155				162
	%			3	3	94				100
Item_2	F				4	29	33	4,88	S	
	Skor				16	145				161
	%				12	88				100
Item_3	F				12	21	33	4,64	S	
	Skor				48	105				153
	%				36	64				100
Item_4	F			2	1	30	33	4,85	S	
	Skor			6	4	150				160

	%			6	3	91	100		
Item_5	F		1	3	21	8	33	4,09	S
	Skor		2	9	84	40	135		
	%		3	9	63	25	100		
Item_6	F				2	31	33	4,93	S
	Skor				8	155	163		
	%				6	94	100		
Rata-rata Keseluruhan								4,72	S

Sumber : Data primer tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel 5.9 dapat diketahui bahwa dari 33 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada kompensasi (X_2) berada pada daerah sangat tinggi dengan skor 4,72. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang baik terhadap Transparansi pada Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.

3) Analisis Deskriptif Variabel Kemampuan Aparatur Desa (X_3)

Analisa deskripsi terhadap variabel Kemampuan Aparatur Desa yang terdiri dari 3 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Kemampuan Aparatur Desa dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5.10
Pernyataan Responden Mengenai Kemampuan Aparatur Desa

Jawaban Responden	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Ket	
Bobot	1	2	3	4	5				
Item_1	F			8	13	12	33	4,52	S
	Skor			24	65	60	149		
	%			24	39	37	100		
Item_2	F			5	19	9	33	4,12	S
	Skor			15	76	45	136		
	%			15	58	27	100		
Item_3	F				15	18	33	4,54	S
	Skor				60	190	150		
	%				45	55	100		
Item_4	F				6	27	33	4,82	S
	Skor				24	135	159		

	%				18	82	100		
Item_5	F				1	32	33	4,97	S
	Skor				4	160	164		
	%				3	97	100		
Item_6	F				5	28	33	4,85	S
	Skor				20	140	160		
	%				15	85	100		
Rata-rata Keseluruhan								4,66	S

Sumber : Data primer tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel 5.10 dapat diketahui bahwa dari 33 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Kemampuan Aparatur Desa (X_3) berada pada daerah sangat Setuju dengan skor 4,66. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang sangat baik terhadap Kemampuan Aparatur Desa pada Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

4) Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Analisa deskripsi terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari 7 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Pengelolaan Dana Desa, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut

Tabel 5.11
Pernyataan Responden Mengenai Pengelolaan Dana Desa

Jawaban Responden	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot	1	2	3	5	5			
Item_1	F			4	29	33	4,88	S
	Skor			16	145	161		
	%			12	88	100		
Item_2	F			12	21	33	4,64	S
	Skor			15	18	33		
	%			60	190	150		
Item_3	F		1	3	29	33	4,85	S
	Skor		3	12	145	160		
	%		3	9	88	100		
Item_4	F		1	1	31	33	4,90	S
	Skor		3	4	155	162		
	%		3	3	94	100		

Item_5	F				4	29	33	4,88	S
	Skor				16	145	161		
	%				12	88	100		
Item_6	F				1	32	33	4,97	S
	Skor				4	160	164		
	%				3	97	100		
Item_7	F				5	28	33	4,85	S
	Skor				20	140	160		
	%				15	85	100		
Rata-rata Keseluruhan								4,85	S

Sumber : Data primer tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel 5.11 dapat diketahui bahwa dari 33 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Pengelolaan Dana Desa (Y) berada pada daerah Setuju dengan skor 4,85. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang baik terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

5.2 Hasil Uji Kualitas Data

5.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Dalam pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Berikut ini disajikan hasil dari uji validitas dari masing-masing variabel.

Tabel 5.12

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_1)

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Akuntabilitas
X1.1	Pearson Correlation	1	,422*	,569**	,182	,734**
	Sig. (2-tailed)		,014	,001	,310	,000
	N	33	33	33	33	33
X1.2	Pearson Correlation	,422*	1	,354*	,617**	,828**
	Sig. (2-tailed)	,014		,043	,000	,000
	N	33	33	33	33	33
X1.3	Pearson Correlation	,569**	,354*	1	,333	,762**
	Sig. (2-tailed)	,001	,043		,058	,000
	N	33	33	33	33	33
X1.4	Pearson Correlation	,182	,617**	,333	1	,652**
	Sig. (2-tailed)	,310	,000	,058		,000
	N	33	33	33	33	33
Akuntabilitas	Pearson Correlation	,734**	,828**	,762**	,652**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS 22

Berikut Penjabaran Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_1) yaitu sebagai berikut:

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_1)

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Item_1	0,734	0.250	Valid
Item_2	0,828	0.250	Valid
Item_3	0,762	0.250	Valid
Item_4	0,652	0.250	Valid

Sumber: Data primer tahun 2021, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Akuntabilitas yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X_2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Transparansi
X2.1	Pearson Correlation	1	,510**	,118	,502**	,158	,345*	,634**
	Sig. (2-tailed)		,002	,514	,003	,379	,049	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.2	Pearson Correlation	,510**	1	,231	,545**	,311	,458**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,002		,195	,001	,078	,007	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.3	Pearson Correlation	,118	,231	1	,232	,433*	,321	,610**
	Sig. (2-tailed)	,514	,195		,194	,012	,068	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.4	Pearson Correlation	,502**	,545**	,232	1	,260	,305	,737**
	Sig. (2-tailed)	,003	,001	,194		,143	,084	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.5	Pearson Correlation	,158	,311	,433*	,260	1	,279	,628**
	Sig. (2-tailed)	,379	,078	,012	,143		,116	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.6	Pearson Correlation	,345*	,458**	,321	,305	,279	1	,641**
	Sig. (2-tailed)	,049	,007	,068	,084	,116		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
Transp aransi	Pearson Correlation	,634**	,742**	,610**	,737**	,628**	,641**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS 22

Berikut Penjabaran Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X₂) yaitu sebagai berikut:

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Item_1	0,634	0.250	Valid
Item_2	0,742	0.250	Valid
Item_3	0,610	0.250	Valid
Item_4	0,737	0.250	Valid
Item_5	0,628	0.250	Valid
Item_6	0,641	0.250	Valid

Sumber: Data primer tahun 2021, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Transparansi yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-

masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Tabel 5.14
Hasil Uji Validitas Kemampuan Aparatur Desa (X₃)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Kemampuan
X3.1	Pearson Correlation	1	,460**	,426*	,755**	,260	,501**	,855**
	Sig. (2-tailed)		,007	,013	,000	,144	,003	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.2	Pearson Correlation	,460**	1	,168	,536**	,299	,121	,631**
	Sig. (2-tailed)	,007		,351	,001	,091	,501	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.3	Pearson Correlation	,426*	,168	1	,437*	-,037	,228	,602**
	Sig. (2-tailed)	,013	,351		,011	,839	,202	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.4	Pearson Correlation	,755**	,536**	,437*	1	,382*	,202	,833**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,011		,028	,261	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.5	Pearson Correlation	,260	,299	-,037	,382*	1	,125	,495**
	Sig. (2-tailed)	,144	,091	,839	,028		,490	,003
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.6	Pearson Correlation	,501**	,121	,228	,202	,125	1	,542**
	Sig. (2-tailed)	,003	,501	,202	,261	,490		,001
	N	33	33	33	33	33	33	33
Kemampuan	Pearson Correlation	,855**	,631**	,602**	,833**	,495**	,542**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,003	,001	
	N	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS 22

Berikut Penjabaran Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Aparatur Desa (X₃) yaitu sebagai berikut:

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Item_1	0,855	0.250	Valid
Item_2	0,631	0.250	Valid
Item_3	0,602	0.250	Valid
Item_4	0,833	0.250	Valid

Item_5	0,495	0.250	Valid
Item_6	0,542	0.250	Valid

Sumber: Data primer tahun 2021, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel kemampuan aparatur desa yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation*> dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Tabel 5.15
Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

		Correlations							Pengelolaan Dana Desa
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
Y1	Pearson Correlation	1	,245	,306	,490**	,210	,437*	,854**	,775**
	Sig. (2-tailed)		,170	,084	,004	,242	,011	,000	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y2	Pearson Correlation	,245	1	,171	,284	,333	,185	,156	,506**
	Sig. (2-tailed)	,170		,340	,109	,058	,302	,386	,003
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y3	Pearson Correlation	,306	,171	1	,331	,429*	,171	,277	,628**
	Sig. (2-tailed)	,084	,340		,060	,013	,340	,119	,000

	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y4	Pearson Correlation	,490**	,284	,331	1	,180	,284	,378*	,659**
	Sig. (2-tailed)	,004	,109	,060		,317	,109	,030	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y5	Pearson Correlation	,210	,333	,429*	,180	1	,167	,281	,594**
	Sig. (2-tailed)	,242	,058	,013	,317		,354	,113	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y6	Pearson Correlation	,437*	,185	,171	,284	,167	1	,500**	,584**
	Sig. (2-tailed)	,011	,302	,340	,109	,354		,003	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y7	Pearson Correlation	,854**	,156	,277	,378*	,281	,500**	1	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,386	,119	,030	,113	,003		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Pengelolaan Dana Desa	Pearson Correlation	,775**	,506**	,628**	,659**	,594**	,584**	,757**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS 22

Berikut Penjabaran Hasil Uji Validitas Variabel Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) yaitu sebagai berikut:

Instrumen penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Item_1	0,775	0.250	Valid
Item_2	0,506	0.250	Valid
Item_3	0,628	0.250	Valid
Item_4	0,659	0.250	Valid
Item_5	0,594	0.250	Valid
Item_6	0,584	0.250	Valid
Item_7	0,757	0.250	Valid

Sumber: Data primer tahun 2021, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Pengelolaan Dana Desa yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

5.2.2 Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi internal. Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α), koefisien reliabilitas $> 0,60$.

Tabel 5.16
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.759	4

Akuntabilitas, Transparansi, KemampuanAD,
PengelolaanDD.

Sumber: Output SPSS 22

Berikut Penjabaran Hasil Uji Reliabilitas Variabel Hasil Variabel Akuntabilitas, Transparansi, Kemampuan Aparatur Desa, Pengelolaan Dana Desa yaitu sebagai berikut:

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas reliabilitas	Ket.
Akuntabilitas	0,713	0.60	Reliabel
Transparansi	0,739	0.60	Reliabel
Kemampuan Aparatur Desa	0,734	0.60	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	0,763	0.60	Reliabel

Sumber: Data primer tahun 2021, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Akuntabilitas, Transparansi, Kemampuan Aparatur Desa dan Pengelolaan Dana Desa yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

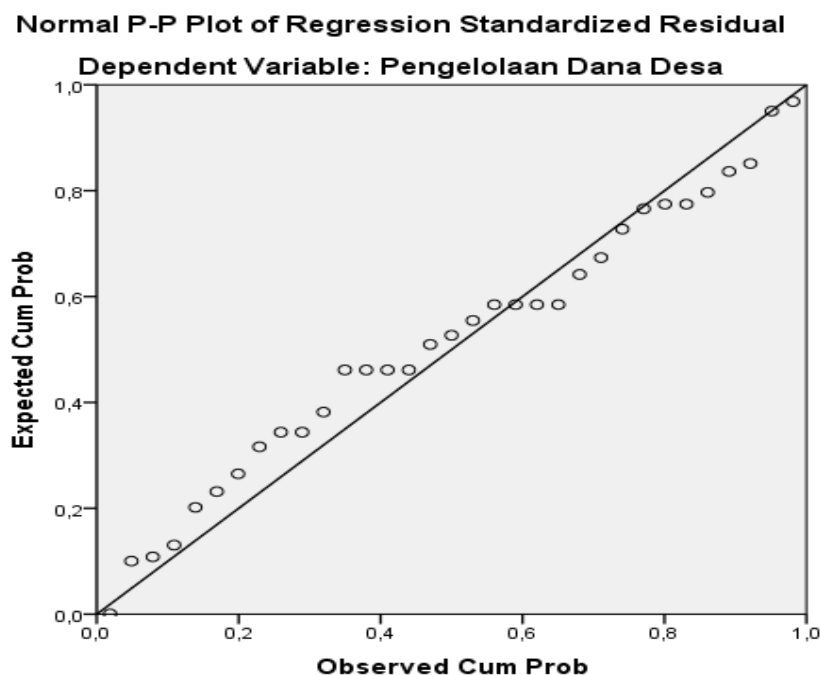
Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas serta uji heteroskedastisitas. Interpretasinya ditunjukkan sebagai berikut:

5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat grafik *normal probability plot* dengan melihat apakah data terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik histogram. Berikut juga menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Grafik normal plot juga mendukung hasil pengujian dengan grafik histogram.

Gambar 5.1

Hasil Uji Normalitas – *Normal Probability Plot*



Sumber: Output SPSS 22

Gambar 5.1 di atas menunjukkan adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik *normal probability plot*.

5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Multikolinearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai $VIF > 10$ dan nilai $tolerance < 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5.17
 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	,304	3,292
	Transparansi	,187	5,344
	Kemampuan	,256	3,911

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output SPSS 22

Berikut Penjabaran Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Akuntabilitas, Transparansi, Kemampuan Aparatur Desa, Pengelolaan Dana Desa yaitu sebagai berikut:

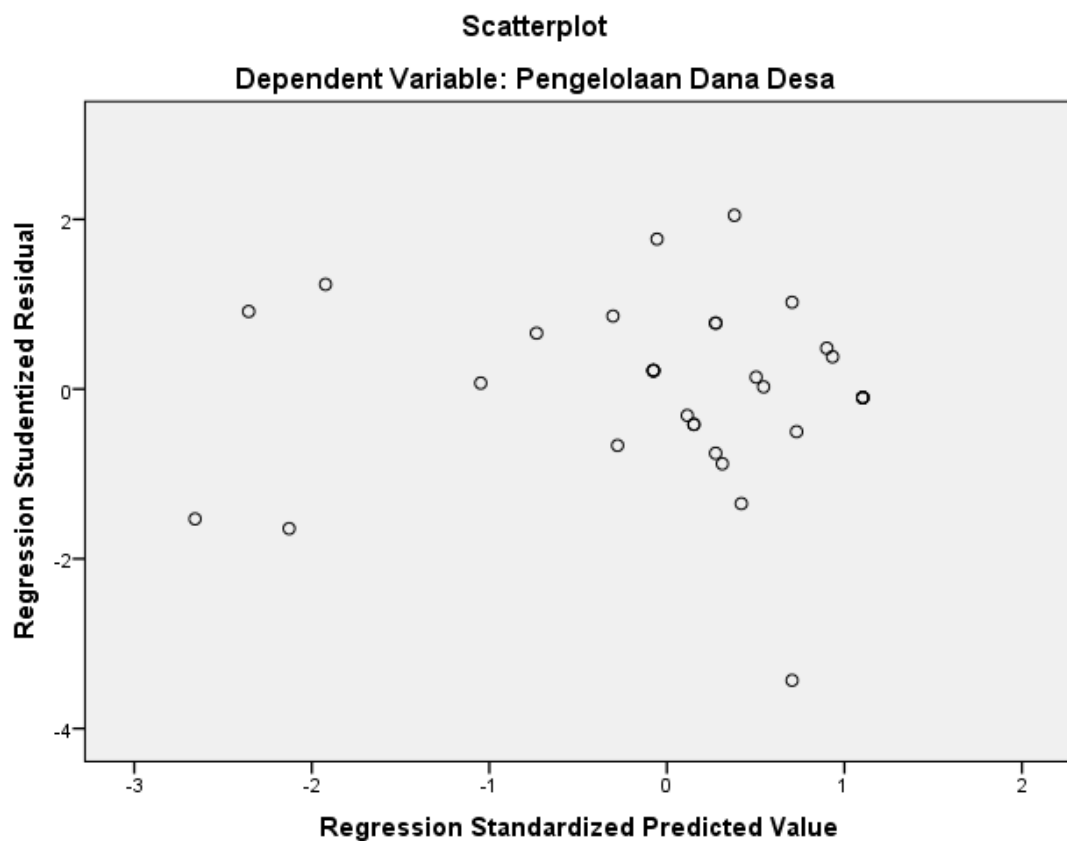
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,304	3,292	Non Multikolinearitas
Transparansi (X2)	0,187	5,344	Non Multikolinearitas
Kemampuan Aparatur Desa (X3)	0,256	3,911	Non Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.17 diatas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Grafik Scatterplot penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pengelolaan Dana Desa berdasarkan masukan variabel independennya (Akuntabilitas, Transparansi, Kemampuan Aparatur Desa).

Gambar 5.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot



Sumber: Output SPSS 22

5.4 Hasil Uji Regresi

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H_1 , H_2 dan H_3 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Dana Desa), Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 22.

5.4.1 Hasil Uji Parsial (T)

Tabel 5.18
Hasil Uji T Hitung
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	,781	,297		2,628	,014
	Akuntabilitas	,249	,077	,361	3,227	,003
	Transparansi	,324	,140	,330	2,315	,028
	Kemampuan	,273	,105	,316	2,594	,015

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 5.18 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 0,249 X_1 + 0,324 X_2 + 0,273 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Pengelolaan Dana Desa
- X₁ = Akuntabilitas
- X₂ = Transparansi
- X₃ = Kemampuan Aparatur Desa
- a = Konstanta
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi
- e = Standar *error*

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X₁) sebesar 0,249 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Akuntabilitas akan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,249. dengan standar error 0,077, standardized Coefficients Beta sebesar 0,361, nilai t sebesar 3,227 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Ini berarti Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

- 2) Koefisien regresi variabel Transparansi (X2) sebesar 0,324 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Transparansi akan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,324. dengan standar error 0,140 standardized Coefficients Beta sebesar 0,330 nilai t sebesar 2,315 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Ini berarti Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- 3) Koefisien regresi variabel Kemampuan Aparatur Desa (X3) sebesar 0,273 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Kemampuan Aparatur Desa akan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,273. Dengan standar error 0,105 standardized Coefficients Beta sebesar 0,316 nilai t sebesar 2,594 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Ini berarti Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

5.4.2 Hasil Uji Simultan (F)

Tabel 5.19
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	2,378	3	,793	77,966	,000 ^b
	Residual	,295	29	,010		
	Total	2,673	32			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Kemampuan , Akuntabilitas , Transparansi

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 77,966 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai F hitung (77,966) lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,15 ($df_1=3-1=2$ dan $df_2=33-3=30$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

5.4.3 Hasil Uji Kesesuaian Model

Tabel 5.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,943 ^a	,890	,878	,10083	2,587

a. Predictors: (Constant), Kemampuan , Akuntabilitas , Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas nilai R adalah 0,890 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,80 – 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh kuat terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R^2 (*Adjusted R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa 0,878, hal ini berarti bahwa 87,8% yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa. Sisanya sebesar 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

5.5 Hipotesis Penelitian

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_1 , H_2 dan H_3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (H_1)

Berdasarkan tabel 5.21 dapat dilihat bahwa variabel Akuntabilitas memiliki t hitung $<$ t tabel yaitu t hitung sebesar 1.625 sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $33-1=32$ sebesar 1,670 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Ini berarti Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin berimplikasi terhadap kinerja pegawai.

- 2) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (H_2)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel Transparansi memiliki t hitung sebesar $3.595 > t$ tabel 1,670 dengan tingkat signifikansi 0,028 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Transparansi dalam organisasi maka akan semakin tinggi Pengelolaan Dana Desa.

- 3) Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (H_3)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel Kemampuan Aparatur Desa memiliki t hitung sebesar $2.730 > t$ tabel 1,670 dengan tingkat signifikansi 0,015 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemampuan Aparatur Desa yang dilandasi dengan berpegang pada nilai moral dan bertanggung jawab akan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa.

5.6 Pembahasan Penelitian

Penelitian ini melibatkan pengaruh variabel bebas (Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Dana Desa), dapat dibuat pembahasan sebagai berikut:

5.6.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas (X_1) adalah Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. (Raharjo Adisasmita, 2017) Indikator Akuntabilitas dalam penelitian ini:

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
- b. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaandana desa.
- c. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
- d. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan danadesa

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat

dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut dikuatkan dengan banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pemasangan spanduk pengumuman yang berisikan laporan keuangan desa untuk satu periode pemerintahan di Balai Desa. Upaya tersebut dilaksanakan pemerintah desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan desa, dan sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat. selain itu, pemasangan spanduk tersebut dilaksanakan karena memang upaya tersebut merupakan upaya termudah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta pengaruh atau timbal balik dari hasil pengelolaan desa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum juga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah desa akan selalu mematuhi prosedur dan hukum, juga akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Hasil dari penelitian dalam variabel akuntabilitas ini juga mendukung penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rina Indrawati Syafi'i, dkk yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2018.

5.6.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Transparansi (X_2) adalah Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup masyarakat. (Kristianten 2017) Indikator Transparansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- b. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.

- c. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Transparansi merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mempunyai wewenang dalam penentuan keputusan penting, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi orang banyak. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap menyangkut segala hal yang telah dikerjakannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang banyak menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap item pertanyaan yang telah disediakan.

Hasil penelitian mengenai transparansi atau keterbukaan pemerintah desa ini ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam pelaksanaan transparansi ini pemerintah juga menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa maupun di papan baleho atau spanduk. Pemerintah juga selalu terbuka dan tidak pernah menutup diri dalam penyediaan informasi

mengenai pengelolaan keuangan desa maupun informasi lain, karena pemerintah Kecamatan Alla tersebut telah sadar secara penuh bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui tentang informasi keuangan desa.

Dengan adanya keterbukaan informasi dan juga pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, maka program pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut didukung dengan adanya usulan atau ide yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga usulan dari masyarakat tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah desa dalam bentuk program. Dimana program tersebut dibiayai oleh dana desa.

Penelitian dengan variabel transparansi ini mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh Weny Ultafiah yang menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, dan dilaksanakan pada tahun 2017.

5.6.3 Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Kemampuan Aparatur Desa (X3) didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu

dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

(Moehariono, 2017) Indikator Kemampuan Aparatur Desa dalam penelitian ini adalah:

- a. Komunikasi
- b. Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

Kemampuan Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian Arif Widyatama, dkk (2017), yang menjelaskan bahwa kemampuan Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Kemampuan Aparatur Desa merupakan keahlian masing-masing individu yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang baik. kemampuan Aparatur Desa merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting. Berdasarkan penelitian kemampuan Aparatur Desa tergolong mampu ketika harus mengelola dana desa yang terbilang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari hasil kuesioner yang menjelaskan bahwa semua aparatur paham akan pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian di atas juga sejalan dan menguatkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017 oleh Rizky Amalia Sugista yang menyatakan bahwa Kemampuan Aparatur Desa secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan).

5.7.3 Pengaruh Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Kemampuan Aparatur Desa (X3) terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Hasil uji hipotesis keseluruhan variabel menunjukkan bahwa F_{hitung} pada masing-masing variabel independen $> F$ tabel. Sehingga, dapat disimpulkan

bahwa Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Kemampuan Aparatur Desa (X3) secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Y).

Hasil penelitian pada transparansi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan pengumuman. Pemerintah Kecamatan di setiap Desa juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Selain itu, masyarakat juga telah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut pemberdayaan masyarakat lebih meningkat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa masing-masing secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
2. Akuntabilitas, Transparansi dan Kemampuan Aparatur Desa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

3. Akuntabilitas adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

6.2 Saran –Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas, maka saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan penyebaran kuesioner kepada aparatur Desa, peneliti sebaiknya menjelaskan tujuan dan juga sasaran dari kuesioner tersebut secara jelas kepada Aparatur Desa, agar tidak takut untuk mengisi kuesionernya.
2. Variabel dalam penelitian ini juga dapat lebih diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya mengenai pengelolaan dana desa, akan tetapi seluruh pengelolaan keuangan desa
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian pada kementerian/lembaga lainnya untuk ⁹² dapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Makasar: Graha Ilmu, 2016.
- Andrianto, Muh. Ashari, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*, Makassar, 2017.
- Ferina, Burhanuddin, Lubis. *Efektifitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di desa Bangunjiwo*, 2016.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pengelolaan Dana Desa*, 2016.
- Singarimbun, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Kartika. *Keuangan Desa Pesisir (Hukum dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif*, Malang: Inteligencia Media, 2018.
- Deri, Wienda, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Surakarta, 2017.
- Mondong., *Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.*, 2018.

- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, *Dana Desa untuk Kesejahteraan Desa*, 2017.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 22 Update PLS Regresi*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Prasetyo, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Widagdo, Widodo, dan Ismail, *Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: LPPI, 2016.
- Ngogare, Ada 181 kasus korupsi dana desa, rugikan negara Rp. 40,6 Miliar, *Kompas.com*, 21 Maret 2018.,
www.nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar.
- Sugiyono, R. L. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2015.
- Jateng, Tribun, *Kades Diduga Selewengkan Dana Desa, Palsukan Tandatangan Camat*, *TribunJateng.com*. 2018.
- Moehariono, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AILAN, 2017.
- Totok Mardikonto, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*, Malang. 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Hasil Dana Desa Sejak 2015*.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan*. 2017.
- Ihyanal Ulum, *Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Dana Desa. Alokasi DanaDesa*, 2018.

- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2016.
- Kristianten, P. S. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet. 2018.
- Nasirah, Banyak Desa di Agara Belum Pasang Baliho Realisasi ADD 2016, beritakini.co/news/banyak-desa-di-Agara-belum-pasang-baliho-realisasi-add-2018. Diakses 25 Februari 2021. 2016.
- Wakhid, M. Indra, *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, Lampung, 2016*
- Suryani, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Cetakan Pertama, PT, Raja Grafindo, Jakarta. 2019.
- Sedarmayanti. *Perilaku Organisasi*, Edisi kesepuluh, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. 2017.
- Rahayu, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung. 2017.
- Prasojo dan Kurniawan, Dwi, *Analisis SEM-PLS dengan Wrap-PLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: penerbit ANDI. 2018.

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

Berikut ini adalah questioner yang berkaitan dengan penelitian tentang **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kemampuan Aparatur Desa terhadap efektifitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”**. Oleh karena itu, disela-sela kesibukan Anda, kami memohon dengan hormat kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk dapat mengisi questioner ini. Atas kesediaan dan partisipasi bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi questioner ini, saya sampaikan banyak terima kasih.

Identitas Responden

N a m a :
 Jabatan :
 Jenis Kelamin :
 U m u r :
 Pendidikan :
 Masa Kerja :

Petunjuk Pengisian

- Berikan tanda centang (√) pada kolom yang dipilih sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara(i).
- Pada masing-masing pernyataan, terdapat lima alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut:

Sangat setuju (SS)	= 5
Setuju (S)	= 4
Netral (N)	= 3
Tidak setuju (TS)	= 2
Sangat tidak setuju (STS)	= 1

Daftar Pernyataan

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
Transparansi						
1.	Saya merasa masyarakat selalu diikutsertakan dalam musyawarah rencana pengalokasian dana desa.					
2.	Masyarakat mempunyai akses yang cukup dalam informasi rencana penggunaan dana desa.					
3.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh informasi pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat.					
4.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh hasil pelaksanaan program desa kepada seluruh masyarakat.					
5.	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang dana desa.					
6.	Saya merasa transparansi pengelolaan dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan rakyat.					
Akuntabilitas						
7.	Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan seluruh unsur masyarakat.					
8.	Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan dan perhatian utama dalam pengalokasian dana desa.					
9.	Masyarakat dapat mudah mengakses dan mendapatkan rincian laporan					

	pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara cepat dan tepat.					
10.	Saya merasa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.					
Kemampuan Aparatur Desa						
11.	Saya memahami Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa					
12.	Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan					
13.	Saya sebagai aparat desa melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
14.	Saya sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan Keuangan					
15.	Saya sebagai aparat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada					
16.	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai					
Pengelolaan Dana Desa (Y)						

17.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa kami, dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah					
18	Laporan keuangan yang kami sajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai					
19	Pemerintah desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan					
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap					
21	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa					
22	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa					
23	masyarakat untuk memanfaatkan berbagai teknologi yang tersedia sebagai pendukung aktivitas.					

Realisasi Dana Desa dan ADD Desa Pana Tahun 2020

URAIAN	Realisasi s.d 31/12/2020		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer			0
Dana Desa	#####	#####	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	989.722.000	989.722.000	0
Alokasi Dana Desa	21.639.361	21.639.361	0
Pendapatan Lain-lain	476.030.000	476.030.000	0
Bunga Bank	1.315.000	2.468.842	1.153.842
JUMLAH PENDAPATAN	1.315.000	2.468.842	1.153.842
BELANJA	#####	#####	1.153.842
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	480.666.027	436.131.920	44.534.107
Penyelenggaraan Bidang Silang, Tunjangan dan Operasional	466.703.427	422.169.320	44.534.107
Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganKepala Desa	66.000.000	66.000.000	0
Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganPerangkat Desa	282.000.000	257.700.000	24.300.000
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa danPerangkat Desa	19.094.400	12.046.320	7.048.080
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKKD dan PPKD dll)	68.251.027	56.865.000	11.386.027
Penyediaan Tunjangan BPD	27.600.000	27.600.000	0
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, MakanMinum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.758.000	1.958.000	1.800.000
Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000	0
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	5.000.000	5.000.000	0
Penyelenggaraan Musyawarah PerencanaanDesa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.962.600	8.962.600	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RP)MDesa/RKPDesa dll)	1.660.000	1.660.000	0
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.350.000	3.350.000	0
LPPDesa danInformasi Kepada Masyarakat	3.313.100	3.313.100	0
639.500	639.500	0	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	347.311.630	324.276.630	23.035.000
Sub Bidang Kesehatan	166.711.880	143.676.880	23.035.000
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KisBumil, Lamsia, Insentif)	12.400.000	12.400.000	0
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	23.100.000	18.000.000	5.100.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.000.000	10.700.000	300.000
Pemeliharaan Sarana PrasaranaPosyandu/Polides/PKD	5.000.000	5.000.000	0
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	115.211.880	97.576.880	17.635.000
- Pembangunan Posyandu Boasan	115.211.880	97.576.880	17.635.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.599.750	180.599.750	0
- Rabat Beton Jalan Depan SDN 113 Pana	39.613.250	39.613.250	0
- Rabat Beton Jalan Pana Karangun	72.148.750	72.148.750	0
- Rabat Beton Dusun Pangrara 2	52.612.750	52.612.750	0
- Pembangunan Talud Pana Karangun	16.225.000	16.225.000	0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	39.116.000	37.516.000	1.600.000
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	4.800.000	3.200.000	1.600.000
Pelatihan/ Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy, diBid, Hukum &	4.800.000	3.200.000	1.600.000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000	24.000.000	0
Penyelenggaraan/Pembinaan Keagamaan	24.000.000	24.000.000	0
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	755.000	755.000	0
Pembinaan Karangtaruna/KlubKepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	755.000	755.000	0
Sub Bidang Kelambagaan Masyarakat	9.561.000	9.561.000	0
Pembinaan PKK	9.561.000	9.561.000	0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.540.000	6.540.000	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.540.000	6.540.000	0
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.540.000	6.540.000	0
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.950.000	4.950.000	0
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1.590.000	1.590.000	0
Kegiatan Penanggulangan Bencana	659.810.370	659.810.000	370
Penanganan Keadaan Mendesak	69.410.370	69.410.000	370
JUMLAH BELANJA	590.400.000	590.400.000	0
SURPLUS / (DEFISIT)	#####	#####	0
PEMBIAYAAN	(44.737.666)	25.585.653	69.169.477
Penerimaan Pembiayaan:			
SILPA Tahun Sebelumnya	44.737.666	44.737.666	0
JUMLAH PEMBIAYAAN	44.737.666	44.737.666	0
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	44.737.666	44.737.666	0
		70.323.319	(70.323.319)

Realisasi Dana Desa dan ADD Desa Mata Allo Tahun 2020

REALISASI PELAKSANAAN APBDesa 2020		DESA MATA ALLO KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN		
URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	REALISASIPERSRABU
		1	2	3
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.229.289.900	129.230.000	
Dana Desa		400.377.000	400.277.000	
Pendapatan Lain-Lain		12.927.847	12.963.000	
Pendapatan Asli Desa		4.081.000	4.000.000	
Pendapatan Asli Masyarakat		1.379.214.847	1.359.720.000	(1.681.214)
Jumlah Pendapatan		436.712.594	441.194.400	(1.681.214)
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA				
Penyediaan Belanja Biaya, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		436.712.594	441.194.400	(1.681.214)
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		66.000.000	66.000.000	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		223.400.000	223.400.000	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		18.300.000	18.300.000	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD dll)		3.275.594	3.275.594	
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		2.000.000	2.000.000	
Penyediaan Interor/Operasional RT/RW		17.000.000	17.000.000	
Belanja Modal Perawatan Elektronik dan Alat Sederet		6.000.000	6.000.000	
Belanja Modal Perawatan Elektronik dan Alat Sederet		660.000	660.000	
Belanja Modal Perawatan Meubel dan Aksesoris Ruangan		2.400.000	2.400.000	
Pengelolaan Administrasi Jaringan dan Inisialis (Listrik, telepon, internet, komputer dll)		4.000.000	4.000.000	
Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasapan		7.800.000	7.800.000	
Penyusunan, Pendataan, dan Pemeliharaan Profil Desa (*)		1.600.000	1.600.000	
Penyusunan Dukungan Perencanaan Desa/Pembinaan APDES (Reguler)		600.000	600.000	
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBD, APBD Desa dll)		2.400.000	2.400.000	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang Pendidikan				
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tamis Baca)		11.777.800	11.777.800	
Sub Bidang Kesehatan				
Penyenggaraan Posyandu (Mkr, Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Interdy)		2.400.000	2.400.000	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan kader Kesehatan dll)		2.400.000	2.400.000	
Pengadaan Sarana/Pasarana Posyandu/Polides		26.089.200	23.808.500	2.280.900
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Pengeroran Jalan Stpk, kampung Baru Satu Mada		6.000.000	6.000.000	
Pengeroran Jalan To'oemba-Gallung		10.139.500	10.139.500	
Lanjutan Pengeroran To'entuk-Camba III		3.750.000	3.750.000	
Perbaikan Dwekker Dusun To'collok		3.750.000	3.750.000	
Pembinaan Drainase Dusun To'collok		222.335.250	217.418.250	4.917.000
Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
PAMSIMAS Desa Mata Allo		30.607.000	30.219.000	388.000
Bantuan Pembangunan Jamban		58.408.000	66.455.250	1.950.750
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.		17.915.000	17.369.000	1.818.250
Pembinaan LKMD/LPM/LPMO		23.218.000	23.004.000	548.000
Pembinaan PKK		93.830.000	93.830.000	214.000
Pengadaan Wireless untuk Masjid se Desa Mata Allo		78.200.000	78.012.500	187.500
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
Peningkatan Kapabilitas Perangkat Desa		31.006.300	28.986.347	2.819.982
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19		4.200.000	4.200.000	119.963
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)		4.200.000	4.200.000	1.800.000
JUMLAH BELANJA		530.338.875	527.500.000	2.838.875
SURPLUS / (DEFISIT)				
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		1.445.126.496	1.416.630.997	28.495.499
SILPA Tahun Sebelumnya		(65.909.649)	(35.732.432)	(30.177.217)
Pengeluaran Pembiayaan		65.909.649	65.909.649	
Biaya Admin Bank/Pajak Atas Bunga		65.909.649	65.909.649	
JUMLAH PEMBIAYAAN		1.445.126.496	1.416.630.997	28.495.499
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN				
		65.909.649	65.000	(66.000)
				(66.000)
				66.000
		65.909.649	65.043.649	66.000
				(30.111.217)

**PEMERINTAH ALTA
KECAMATAN ENREKANG
KABUPATEN ENREKANG**

REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EBIH/(KURANG) (Rp)
I. PENDAPATAN			
Jumlah Pendapatan			
1. Pendapatan Transfer	1.462.572.000	1.462.572.000	-
2. Pendapatan Asli Desa	993.329.000	993.329.000	-
3. Lain-lain	469.243.000	469.243.000	-
Jumlah Pendapatan	2.925.144.000	2.925.144.000	-
II. BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000	66.000.000	-
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000	282.000.000	-
3. Kegiatan Operasional Perangkat Desa	48.600.000	47.200.000	1.400.000
4. Kegiatan Operasional BPD	22.800.000	22.800.000	-
5. Kegiatan Operasional BPD	3.240.000	3.240.000	-
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	30.258.000	29.181.500	1.076.500
7. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.345.000	10.345.000	-
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	463.243.000	460.766.500	2.476.500
Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
1. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	411.436.200	312.281.000	99.155.200
2. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Hamil	2.350.000	2.350.000	-
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Masyarakat (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan dll)	12.000.000	-	12.000.000
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.905.000	6.905.000	-
5. Perkerasan Jl. Tani Sittok - Lappa	11.000.000	6.000.000	5.000.000
6. Perkerasan Jl. Tani Bt Angin - Salu Dua	129.447.400	95.506.500	33.940.900
7. Jamban RTM	126.132.000	94.154.000	31.978.000
8. Pembangunan Drainase Bubun Saruran	49.141.800	45.151.500	3.990.300
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	68.960.000	62.214.000	6.746.000
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.500.000	-	5.500.000
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.100.000.000	789.000.000	311.000.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000	3.600.000	-
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3.600.000	3.600.000	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1. Pelatihan Aparatur Desa	5.400.000	2.400.000	3.000.000
2. Pelatihan BUMDes	2.400.000	2.400.000	-
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.800.000	4.800.000	3.000.000
Bidang Pengembangan Bencana Darurat dan Mendesak			
1. Bidang Pengembangan Bencana	3.000.000	-	3.000.000
2. Bidang Keadaan Mendesak Desa	578.892.800	573.280.500	5.612.300
3. Bidang Tak Terduga (BLT)	35.292.800	31.480.500	3.812.300
4. Bidang Tak Terduga (BLT)	543.600.000	541.800.000	1.800.000
Jumlah Belanja Bidang Pengembangan Bencana Darurat dan Mendesak	1.160.795.600	1.146.561.000	14.234.600
Jumlah Belanja	2.637.688.600	2.359.613.500	278.075.100
SURPLUS / (DEFISIT)	1.462.572.000	1.352.328.000	104.631.700
III. BIAYA			
1. BIAYA PEMBIAYAAN			
a. Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya			
1. Salpa ADD	96.275.966	96.275.966	-
2. Salpa ADD	96.275.966	96.275.966	-
3. Salpa ADD	96.275.966	107.341.000	(10.065.034)
4. Salpa ADD	96.275.966	6.745.000	(89.530.966)
5. Salpa ADD	96.275.966	9.853.000	(86.422.966)
6. Salpa ADD	96.275.966	66.000	(95.615.966)
7. Salpa ADD	96.275.966	19.955.000	(76.320.966)
8. Salpa ADD	96.275.966	4.000.000	(92.275.966)
9. Salpa ADD	96.275.966	1.400.000	(94.875.966)
10. Salpa ADD	96.275.966	65.322.000	(30.953.966)
Jumlah Pembiayaan	96.275.966	468.067.000	(471.791.034)
b. (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			
1. (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	117.012.579	-	117.012.579
Jumlah (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	117.012.579	-	117.012.579

ANGGARAN DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA, KABUPATEN ENREKANG				
NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang) Rp.
		1.564.399.423,00	1.565.781.522,00	1.382.099,00
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Desa	1.073.485.000,00	1.073.485.000,00	-
2	Dana Desa	19.560.823,00	19.560.823,00	-
3	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	467.852.000,00	467.852.000,00	-
4	Alokasi Dana Desa	8.993.974,00	8.993.974,00	-
5	Silpa Tahun 2019	577.600,00	-	(400)
6	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya	2.924.000,00	4.305.699,00	(1.381.699)
7	Bunga Bank	-	-	-
BELANJA				
A	BIDANG PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA	493.297.797,00	489.264.297,00	4.033.500,00
	Pendidikan Pengabdian Tenaga Dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	66.000.000,00	-
	Pendidikan Pengabdian Tenaga Dan Tunjangan Perangkat Desa	306.300.000,00	306.300.000,00	-
	Pendidikan Operasional Pemerintah Desa	81.124.823,00	77.091.323,00	4.033.500,00
	Pendidikan Operasional Pemerintah Desa	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	Pendidikan Tunjangan BPD	5.450.000,00	5.450.000,00	-
	Pendidikan Operasional BPD	2.960.974,00	2.960.974,00	-
	SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA	8.662.000,00	8.662.000,00	-
	SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	8.662.000,00	8.662.000,00	-
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	173.967.100,00	158.227.074,00	15.735.026,00
	SUB BIDANG PENDIDIKAN			
	Peningkatan Dan Pembinaan Sanggar Seni Dan Belajar	13.850.724,00	13.850.724,00	-
	SUB BIDANG KESEHATAN			
	Peningkatan Pasyanda	4.115.000,00	4.115.000,00	-
	Perubahan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Peningkatan Desa Siaga Kesehatan	11.006.026,00	8.246.000,00	2.760.026,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Pasyanda/POLINDES/ PKD	5.040.000,00	5.040.000,00	-
	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan Gang	27.920.000,00	22.320.000,00	5.600.000,00
	SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN			
	Pemeliharaan Fasilitas Pengolahan sampah Desa (Penampung, Bak sampah DI)	24.923.350,00	17.548.350,00	7.375.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dll**	77.607.000,00	77.607.000,00	-
	SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA			
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DI)	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	6.033.000,00	6.033.000,00	-
	SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT			
	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	1.300.000,00	1.300.000,00	-
	Pembinaan PKK	4.733.000,00	4.733.000,00	-
	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA	25.702.900,00	14.034.900,00	11.668.000,00
	BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
	Peningkatan/ Bimtek/ pengenalan TTG untuk Pertanian/ peternakan	14.623.000,00	6.555.000,00	8.068.000,00
	BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL			
	Peningkatan BUM Desa (Persiapan Dan Pembentukan Awal BUM Desa)	6.264.900,00	2.664.900,00	3.600.000,00
	Peningkatan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	4.815.000,00	4.815.000,00	-
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN MENDESAK	769.820.000,00	769.457.500,00	362.500,00
	SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA			
	Penanggulangan Bencana (COVID-19)	64.220.000,00	63.857.500,00	362.500,00
	SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK			
	Peningkatan Tunai (BLT)	705.600.000,00	705.600.000,00	-
	TOTAL BELANJA	1.468.815.797,00	1.437.016.771,00	31.799.026,00
	Saldo	104.577.600,00	104.000.000,00	577.600,00
	Saldo lainnya	8.993.974,00	8.993.974,00	-
	SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)	Rp	33.758.725	

Realisasi Dana Desa dan ADD Desa Taulo Tahun 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TAULO
 KECAMATAN ALLA, KABUPATEN ENREKANG

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa			
Hasil Usaha Desa (BUMDes)	1.156.200	1.156.200	
Pendapatan Transfer	1.156.200	1.156.200	
Dana Desa	1.496.376.608	1.496.376.608	
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.021.990.000	1.021.990.000	
Alokasi Dana Desa	19.498.608	19.498.608	
Pendapatan lain-lain	454.888.000	454.888.000	
Bunga Bank	1.900.000	6.186.287	(4.286.287)
JUMLAH PENDAPATAN	1.900.000	6.186.287	(4.286.287)
BELANJA	1.499.432.808	1.503.719.095	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	467.477.139	466.212.949	1.264.190
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	66.000.000	66.000.000	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	233.400.000	233.400.000	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	68.473.000	68.473.000	
Penyediaan Tunjangan BPD	22.800.000	22.800.000	
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik)	5.285.000	5.285.000	
Biaya Admin Bank/Pajak Atas Bunga	2.564.331	1.300.141	1.264.190
Pemeliharaan Komputer dan Printer	1.156.200	1.156.200	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (**)	58.718.608	58.718.608	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	1.500.000	1.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	2.215.000	2.215.000	
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	5.120.000	5.120.000	
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	245.000	245.000	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	492.641.750	461.865.500	30.776.250
Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumik, Lansia, Insentif)	6.637.000	6.637.000	
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Dll)	5.400.000	5.400.000	
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.000.000	6.000.000	
Pelatihan Kader Pembangunan Manusia	1.500.000	1.500.000	
Pemeliharaan Jalan Desa Taulo (Pembangunan Talud)	8.199.950	7.329.950	870.000
Pemeliharaan Jalan Desa Taulo	7.500.000	7.500.000	
Pengecoran Jalan Dusun Malele Kalaja	33.579.500	31.613.500	1.966.000
Pengecoran Jalan Buntu Cui	87.942.850	81.128.100	6.814.750
Perintisan Jalan Tanj Dusun Taulo	47.152.000	47.152.000	
Rabat Beton Jalan Tanj Dewata	95.865.750	88.510.750	7.355.000
Rabat Beton Jalan Tanj Warrang-Bongli	59.853.500	55.382.000	4.471.500
Lanjutan Drainase Malele Kalaja	87.537.000	78.590.500	8.946.500
Pengadaan Gorong-Gorong	5.014.000	4.664.500	352.500
Pengadaan Meteran Saran Air Bersih Desa taulo	35.000.000	35.000.000	
Pembangunan Jamban Desa Taulo	5.460.200	5.460.200	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	16.199.000	16.199.000	
Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.200.000	3.200.000	
Penyelenggaraan/Pembinaan Keagamaan	2.000.000	2.000.000	
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.469.000	6.469.000	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	900.000	900.000	
Pembinaan PKK	3.630.000	3.630.000	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.400.000	2.400.000	
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.400.000	2.400.000	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	537.339.300	536.100.000	1.239.300
Penanggulangan Wabah Covid-19	85.239.300	84.000.000	1.239.300
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	452.100.000	452.100.000	
JUMLAH BELANJA	1.516.057.189	1.482.777.449	33.279.740
SURPLUS / (DEFISIT)	(16.624.381)	20.941.646	(37.566.027)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	16.624.381	16.624.381	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.624.381	16.624.381	
JUMLAH PEMBIAYAAN	16.624.381	16.624.381	
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		37.566.027	(37.566.027)

Survey dan pembagian kuesioner di Kantor Desa Mata Allo



Survey dan pembagian kuesioner di Kantor Desa Sumillan



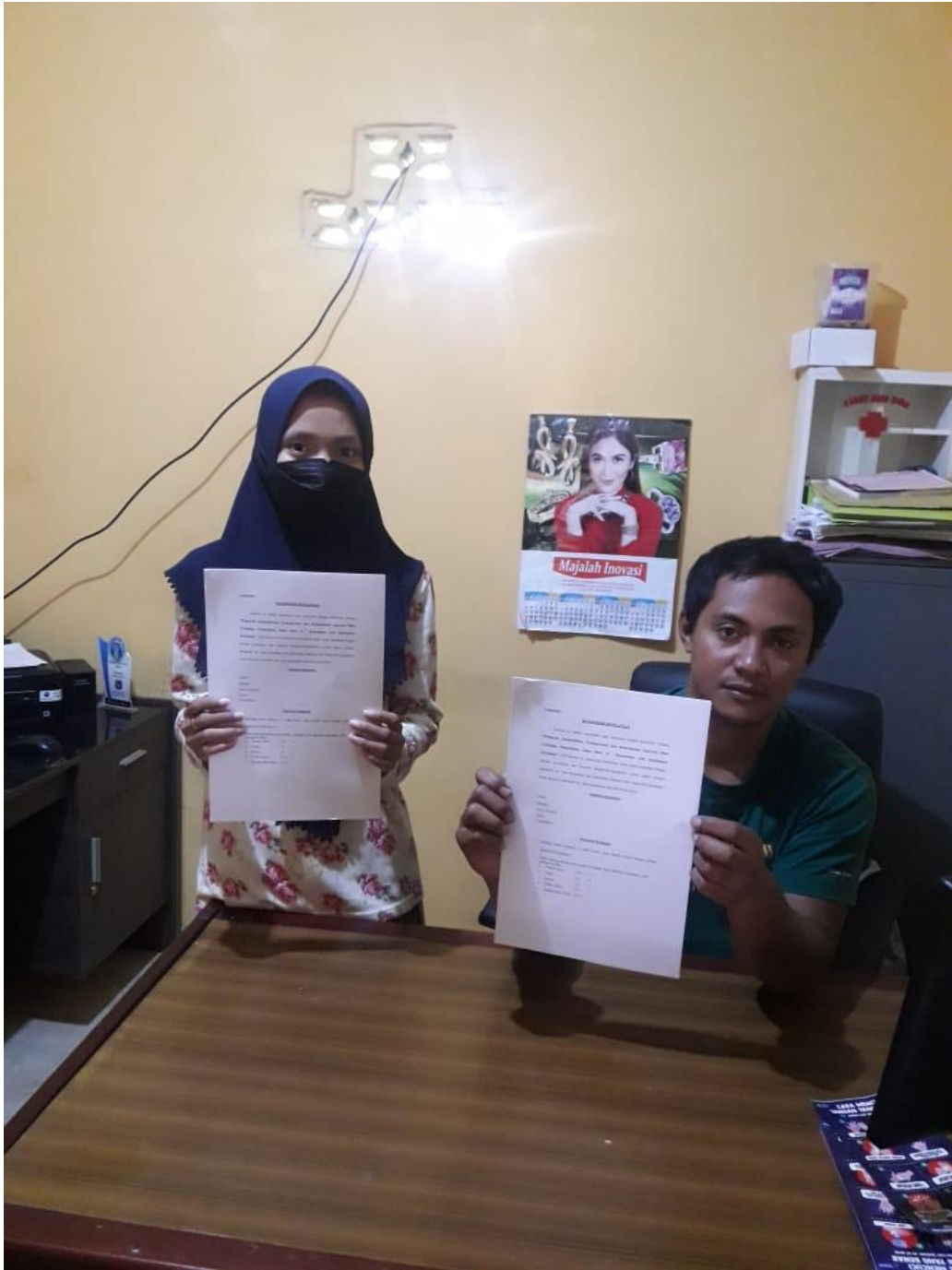
Survey dan pembagian kuesioner di Kantor Desa Bolang



Survey dan pembagian kuesioner di Kantor Desa Taulo



Survey dan pembagian kuesioner di Kantor Desa Pana



- **UJI VALIDITAS ITEM ($r > 0.344$)**
 - 1. VALIDITAS AKUNTABILITAS (X1)**

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Akuntabilitas
X1.1	Pearson Correlation	1	,422*	,569**	,182	,734**
	Sig. (2-tailed)		,014	,001	,310	,000
	N	33	33	33	33	33
X1.2	Pearson Correlation	,422*	1	,354*	,617**	,828**
	Sig. (2-tailed)	,014		,043	,000	,000
	N	33	33	33	33	33
X1.3	Pearson Correlation	,569**	,354*	1	,333	,762**
	Sig. (2-tailed)	,001	,043		,058	,000
	N	33	33	33	33	33
X1.4	Pearson Correlation	,182	,617**	,333	1	,652**
	Sig. (2-tailed)	,310	,000	,058		,000
	N	33	33	33	33	33
Akuntabilitas	Pearson Correlation	,734**	,828**	,762**	,652**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. VALIDITAS TRANSPARANSI (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Transparansi
X2.1	Pearson Correlation	1	,510**	,118	,502**	,158	,345*	,634**
	Sig. (2-tailed)		,002	,514	,003	,379	,049	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.2	Pearson Correlation	,510**	1	,231	,545**	,311	,458**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,002		,195	,001	,078	,007	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.3	Pearson Correlation	,118	,231	1	,232	,433*	,321	,610**
	Sig. (2-tailed)	,514	,195		,194	,012	,068	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.4	Pearson Correlation	,502**	,545**	,232	1	,260	,305	,737**
	Sig. (2-tailed)	,003	,001	,194		,143	,084	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.5	Pearson Correlation	,158	,311	,433*	,260	1	,279	,628**
	Sig. (2-tailed)	,379	,078	,012	,143		,116	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X2.6	Pearson Correlation	,345*	,458**	,321	,305	,279	1	,641**
	Sig. (2-tailed)	,049	,007	,068	,084	,116		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
Transparansi	Pearson Correlation	,634**	,742**	,610**	,737**	,628**	,641**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. VALIDITAS KEMAMPUAN (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Kemampuan
X3.1	Pearson Correlation	1	,460**	,426*	,755**	,260	,501**	,855**
	Sig. (2-tailed)		,007	,013	,000	,144	,003	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.2	Pearson Correlation	,460**	1	,168	,536**	,299	,121	,631**
	Sig. (2-tailed)	,007		,351	,001	,091	,501	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.3	Pearson Correlation	,426*	,168	1	,437*	-,037	,228	,602**
	Sig. (2-tailed)	,013	,351		,011	,839	,202	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.4	Pearson Correlation	,755**	,536**	,437*	1	,382*	,202	,833**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,011		,028	,261	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.5	Pearson Correlation	,260	,299	-,037	,382*	1	,125	,495**
	Sig. (2-tailed)	,144	,091	,839	,028		,490	,003
	N	33	33	33	33	33	33	33
X3.6	Pearson Correlation	,501**	,121	,228	,202	,125	1	,542**
	Sig. (2-tailed)	,003	,501	,202	,261	,490		,001
	N	33	33	33	33	33	33	33
Kemampuan	Pearson Correlation	,855**	,631**	,602**	,833**	,495**	,542**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,003	,001	
	N	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. VALIDASI PENGELOLAAN DANA DESA (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Pengelolaan Dana Desa
Y1	Pearson Correlation	1	,245	,306	,490**	,210	,437*	,854**	,775**
	Sig. (2-tailed)		,170	,084	,004	,242	,011	,000	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y2	Pearson Correlation	,245	1	,171	,284	,333	,185	,156	,506**
	Sig. (2-tailed)	,170		,340	,109	,058	,302	,386	,003
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y3	Pearson Correlation	,306	,171	1	,331	,429*	,171	,277	,628**
	Sig. (2-tailed)	,084	,340		,060	,013	,340	,119	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y4	Pearson Correlation	,490**	,284	,331	1	,180	,284	,378*	,659**
	Sig. (2-tailed)	,004	,109	,060		,317	,109	,030	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y5	Pearson Correlation	,210	,333	,429*	,180	1	,167	,281	,594**
	Sig. (2-tailed)	,242	,058	,013	,317		,354	,113	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y6	Pearson Correlation	,437*	,185	,171	,284	,167	1	,500**	,584**
	Sig. (2-tailed)	,011	,302	,340	,109	,354		,003	,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Y7	Pearson Correlation	,854**	,156	,277	,378*	,281	,500**	1	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,386	,119	,030	,113	,003		,000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Pengelolaan Dana Desa	Pearson Correlation	,775**	,506**	,628**	,659**	,594**	,584**	,757**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- **UJI RELIABILITAS**

1. **RELIABILITAS AKUNTABILITAS (X1)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.713	4

→ Nilai Cronbach's Alpha

$$0.713 > 0.50$$

2. **RELIABILITAS TRANSPARANSI (X2)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.739	6

→ Nilai Cronbach's Alpha

$$0.739 > 0.50$$

3. **RELIABILITAS KEMAMPUAN (X3)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	6

→ Nilai Cronbach's Alpha

$$0.734 > 0.50$$

4. **RELIABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Y)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.763	7

→ Nilai Cronbach's Alpha

$$0.763 > 0.50$$

- **UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM)**

1. **DESKRIPTIF RESPONDEN**

*Peneliti tidak melampirkan output spss uji deskriptif responden

2. **DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	33	3,50	5,00	4,5379	,41983
Transparansi	33	3,83	5,00	4,7073	,29411
Kemampuan	33	3,67	5,00	4,6670	,33506
Pengelolaan Dana Desa	33	3,86	5,00	4,7091	,28901
Valid N (listwise)	33				

VARIABEL AKUNTABILITAS (X1)

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	1	3,0	3,0	3,0
Setuju	23	69,7	69,7	72,7
Sangat Setuju	9	27,3	27,3	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	5	15,2	15,2	15,2
Setuju	7	21,2	21,2	36,4
Sangat Setuju	21	63,6	63,6	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	2	6,1	6,1	6,1
	Setuju	11	33,3	33,3	39,4
	Sangat Setuju	20	60,6	60,6	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	4	12,1	12,1	12,1
	Sangat Setuju	29	87,9	87,9	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

VARIABEL TRANSPARANSI (X2)

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	1	3,0	3,0	3,0
	Setuju	1	3,0	3,0	6,1
	Sangat Setuju	31	93,9	93,9	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	18,2	18,2	18,2
Sangat Setuju	27	81,8	81,8	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	14	42,4	42,4	42,4
Sangat Setuju	19	57,6	57,6	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	2	6,1	6,1	6,1
Setuju	3	9,1	9,1	15,2
Sangat Setuju	28	84,8	84,8	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	23	69,7	69,7	69,7
Sangat Setuju	10	30,3	30,3	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	5	15,2	15,2	15,2
Sangat Setuju	28	84,8	84,8	100,0
Total	33	100,0	100,0	

VARIABEL KEMAMPUAN (X3)

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	2	6,1	6,1	6,1
Setuju	1	3,0	3,0	9,1
Sangat Setuju	30	90,9	90,9	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	10	30,3	30,3	30,3
Sangat Setuju	23	69,7	69,7	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	2	6,1	6,1	6,1
Setuju	14	42,4	42,4	48,5
Sangat Setuju	17	51,5	51,5	100,0
Total	33	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	1	3,0	3,0	3,0
	Setuju	5	15,2	15,2	18,2
	Sangat Setuju	27	81,8	81,8	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	19	57,6	57,6	57,6
	Sangat Setuju	14	42,4	42,4	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	1	3,0	3,0	3,0
	Setuju	5	15,2	15,2	18,2
	Sangat Setuju	27	81,8	81,8	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

VARIABEL PENGELOLAAN DANA DESA (Y)

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	1	3,0	3,0	3,0
	Setuju	2	6,1	6,1	9,1
	Sangat Setuju	30	90,9	90,9	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	6	18,2	18,2	18,2
	Sangat Setuju	27	81,8	81,8	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	16	48,5	48,5	48,5
	Sangat Setuju	17	51,5	51,5	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	1	3,0	3,0	3,0
	Setuju	5	15,2	15,2	18,2
	Sangat Setuju	27	81,8	81,8	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	22	66,7	66,7	66,7
Sangat Setuju	11	33,3	33,3	100,0
Total	33	100,0	100,0	

Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	18,2	18,2	18,2
Sangat Setuju	27	81,8	81,8	100,0
Total	33	100,0	100,0	

Y7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	1	3,0	3,0	3,0
Setuju	4	12,1	12,1	15,2
Sangat Setuju	28	84,8	84,8	100,0
Total	33	100,0	100,0	

- **UJI ASUMSI KLASIK**

1. **UJI NORMALITAS**

Nilai Sig 0.670 > 0.05 → Data terdistribusi normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,0959888
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,078
	Negative	-,126
Kolmogorov-Smirnov Z		,724
Asymp. Sig. (2-tailed)		,670

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. **UJI MULTIKOLINEARITAS → NILAI VIF < 10.00**

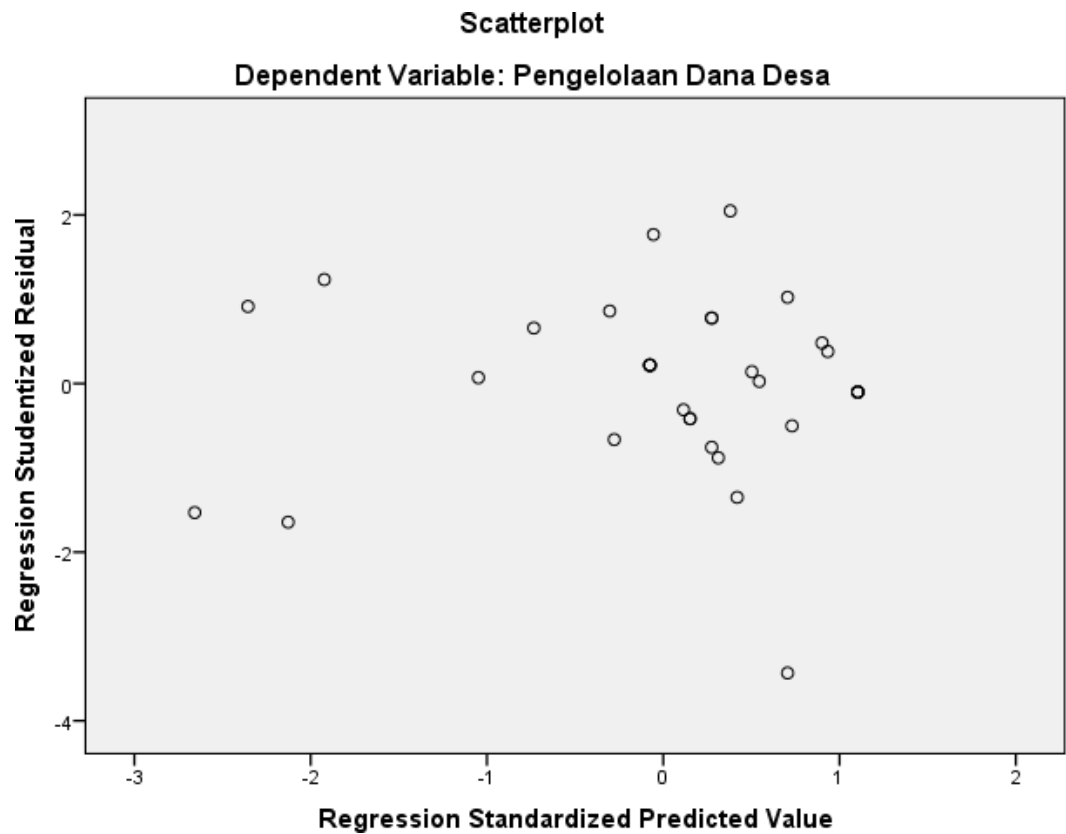
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	,304	3,292
	Transparansi	,187	5,344
	Kemampuan	,256	3,911

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas



- **UJI HIPOTESIS**

1. **UJI T → T TABEL = 2.034**

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,781	,297		2,628	,014
	Akuntabilitas	,249	,077	,361	3,227	,003
	Transparansi	,324	,140	,330	2,315	,028
	Kemampuan	,273	,105	,316	2,594	,015

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

2. **UJI F → F TABEL = 2.90**

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,378	3	,793	77,966	,000 ^b
	Residual	,295	29	,010		
	Total	2,673	32			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Kemampuan, Akuntabilitas, Transparansi

3. UJI KOEFISIEN REGRESI

VARIABEL AKUNTABILITAS (X1), TRANSPARANSI (X2),
KEMAMPUAN (X3) →
VARIABEL PENGELOLAAN DANA DESA (Y)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kemampuan , Akuntabilitas , Transparansi ^b		Enter

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,943 ^a	,890	,878	,10083

a. Predictors: (Constant), Kemampuan , Akuntabilitas , Transparansi

LAMPIRAN 3: TABULASI DATA RESPONDEN

AKUNTABILITAS (X1)

No	Jenis Kelamin	Umur	Masa Kerja	Pendidikan	Akuntabilitas (X1)				Total
					1	2	3	4	
1	Laki-laki	29	4	Sarjana	4	5	5	4	18

2	Perempuan	35	8	Sarjana	5	4	4	4	17
3	Laki-laki	48	18	Sarjana	4	4	5	3	16
4	Laki-laki	24	4	SMA	4	4	5	5	18
5	Laki-laki	50	23	SMA	4	5	5	5	19
6	Perempuan	39	9	Sarjana	4	5	5	5	19
7	Perempuan	26	3	Sarjana	5	5	5	5	20
8	Laki-laki	34	8	Sarjana	5	5	4	5	19
9	Laki-laki	46	17	Sarjana	5	5	4	5	19
10	Laki-laki	30	7	SMA	3	5	5	5	20
11	Laki-laki	33	8	Sarjana	4	5	5	4	18
12	Perempuan	23	5	SMA	5	5	5	4	19
13	Laki-laki	42	15	Sarjana	4	4	4	4	16
14	Laki-laki	30	6	Diploma	5	4	5	4	18
15	Perempuan	43	13	SMA	4	4	4	4	16
16	Perempuan	32	8	Sarjana	5	5	5	4	19
17	Perempuan	37	12	Sarjana	4	5	4	4	17
18	Laki-laki	32	7	Sarjana	4	5	3	5	17
19	Laki-laki	39	10	Sarjana	4	4	5	5	18
20	Perempuan	30	5	SMA	5	5	4	4	18
21	Perempuan	28	5	Sarjana	4	4	3	5	17
22	Perempuan	24	3	SMA	5	5	3	4	17
23	Laki-laki	44	19	SMA	5	5	3	5	18
24	Laki-laki	43	22	SMA	5	4	5	5	19
25	Laki-laki	33	8	Sarjana	5	5	4	4	18
26	Perempuan	41	19	SMA	5	5	5	4	19
27	Laki-laki	49	24	SMA	5	5	3	5	18
28	Laki-laki	36	9	SMA	5	5	4	5	19
29	Laki-laki	34	9	SMA	5	5	4	5	19
30	Perempuan	29	5	Sarjana	5	5	4	5	19
31	Laki-laki	36	10	Sarjana	5	5	4	5	19
32	Laki-laki	57	28	Sarjana	5	5	4	5	19
33	Laki-laki	31	7	Sarjana	5	5	4	5	19

TRANSPARANSI (X2)

No	Jenis Kelamin	Umur	Masa Kerja	Pendidikan	Transparansi (X2)						Total
					1	2	3	4	5	6	
1	Laki-laki	29	4	Sarjana	4	5	4	5	5	4	27
2	Perempuan	35	8	Sarjana	5	4	5	4	4	4	26
3	Laki-laki	48	18	Sarjana	4	4	4	4	5	3	24
4	Laki-laki	24	4	SMA	4	4	4	4	5	5	26
5	Laki-laki	50	23	SMA	4	5	4	5	5	5	28

6	Perempuan	39	9	Sarjana	4	5	4	5	5	5	28
7	Perempuan	26	3	Sarjana	5	5	5	5	5	5	30
8	Laki-laki	34	8	Sarjana	5	5	5	5	4	5	29
9	Laki-laki	46	17	Sarjana	5	5	5	5	4	5	29
10	Laki-laki	30	7	SMA	3	5	3	5	5	5	26
11	Laki-laki	33	8	Sarjana	4	5	4	5	5	4	27
12	Perempuan	23	5	SMA	5	5	5	5	5	4	29
13	Laki-laki	42	15	Sarjana	4	4	4	4	4	4	24
14	Laki-laki	30	6	Diploma	5	4	5	4	5	4	27
15	Perempuan	43	13	SMA	4	4	4	4	4	4	24
16	Perempuan	32	8	Sarjana	5	5	5	5	5	4	29
17	Perempuan	37	12	Sarjana	4	5	4	5	4	4	26
18	Laki-laki	32	7	Sarjana	4	5	4	5	3	5	26
19	Laki-laki	39	10	Sarjana	4	4	4	4	5	5	26
20	Perempuan	30	5	SMA	5	5	5	5	4	4	28
21	Perempuan	28	5	Sarjana	4	4	4	4	3	5	24
22	Perempuan	24	3	SMA	5	5	5	5	3	4	27
23	Laki-laki	44	19	SMA	5	5	5	5	3	5	28
24	Laki-laki	43	22	SMA	5	4	5	4	5	5	28
25	Laki-laki	33	8	Sarjana	5	5	5	5	4	4	28
26	Perempuan	41	19	SMA	5	5	5	5	5	4	29
27	Laki-laki	49	24	SMA	5	5	5	5	3	5	28
28	Laki-laki	36	9	SMA	5	5	5	5	4	5	29
29	Laki-laki	34	9	SMA	5	5	5	5	4	5	29
30	Perempuan	29	5	Sarjana	5	5	5	5	4	5	29
31	Laki-laki	36	10	Sarjana	5	5	5	5	4	5	29
32	Laki-laki	57	28	Sarjana	5	5	5	5	4	3	27
33	Laki-laki	31	7	Sarjana	5	5	5	5	4	5	29

KEMAMPUAN APARATUR DESA (X3)

No	Jenis Kelamin	Umur	Masa Kerja	Pendidikan	Kemampuan Aparatur Desa (X3)						Total
					1	2	3	4	5	6	
1	Laki-laki	29	4	Sarjana	4	5	4	3	5	4	25
2	Perempuan	35	8	Sarjana	3	4	5	4	4	4	24
3	Laki-laki	48	18	Sarjana	4	4	4	4	2	3	24
4	Laki-laki	24	4	SMA	4	4	5	4	5	4	26
5	Laki-laki	50	23	SMA	4	5	4	5	5	5	28
6	Perempuan	39	9	Sarjana	4	5	4	5	5	4	28

7	Perempuan	26	3	Sarjana	5	5	5	5	5	5	30
8	Laki-laki	34	8	Sarjana	3	5	5	5	4	5	27
9	Laki-laki	46	17	Sarjana	5	5	5	5	4	5	29
10	Laki-laki	30	7	SMA	5	5	3	4	5	5	27
11	Laki-laki	33	8	Sarjana	4	5	4	3	5	4	27
12	Perempuan	23	5	SMA	5	5	5	5	5	4	29
13	Laki-laki	42	15	Sarjana	4	4	4	4	4	4	24
14	Laki-laki	30	6	Diploma	5	4	5	4	5	4	27
15	Perempuan	43	13	SMA	4	4	4	4	4	4	24
16	Perempuan	32	8	Sarjana	5	5	5	5	5	4	29
17	Perempuan	37	12	Sarjana	4	5	4	5	4	4	26
18	Laki-laki	32	7	Sarjana	4	5	4	5	3	5	26
19	Laki-laki	39	10	Sarjana	4	4	4	4	5	5	26
20	Perempuan	30	5	SMA	5	5	5	5	4	4	28
21	Perempuan	28	5	Sarjana	4	4	4	4	3	5	24
22	Perempuan	24	3	SMA	5	5	5	5	3	4	27
23	Laki-laki	44	19	SMA	5	5	5	5	3	5	28
24	Laki-laki	43	22	SMA	5	4	5	4	5	5	28
25	Laki-laki	33	8	Sarjana	5	4	5	5	5	4	28
26	Perempuan	41	19	SMA	5	5	5	5	5	4	29
27	Laki-laki	49	24	SMA	5	3	5	5	5	5	28
28	Laki-laki	36	9	SMA	5	4	5	5	5	5	29
29	Laki-laki	34	9	SMA	5	5	5	5	4	5	29
30	Perempuan	29	5	Sarjana	5	4	5	5	5	5	29
31	Laki-laki	36	10	Sarjana	5	5	5	5	4	5	29
32	Laki-laki	57	28	Sarjana	5	5	5	4	5	3	27
33	Laki-laki	31	7	Sarjana	5	5	4	5	5	5	29

PENGELOLAAN DANA DESA (Y)

No	Jenis Kelamin	Umur	Masa Kerja	Pendidikan	Pengelolaan Dana Desa (Y)							Total
					1	2	3	4	5	6	7	
1	Laki-laki	29	4	Sarjana	4	5	4	4	5	4	4	30
2	Perempuan	35	8	Sarjana	5	4	5	4	4	4	3	29
3	Laki-laki	48	18	Sarjana	4	4	4	4	2	3	4	28
4	Laki-laki	24	4	SMA	5	4	5	4	5	4	4	31
5	Laki-laki	50	23	SMA	4	5	4	5	5	5	4	32
6	Perempuan	39	9	Sarjana	4	5	4	5	5	4	4	32
7	Perempuan	26	3	Sarjana	5	5	5	5	5	5	5	35
8	Laki-laki	34	8	Sarjana	5	5	5	5	4	5	3	32
9	Laki-laki	46	17	Sarjana	5	5	5	5	4	5	5	34

10	Laki-laki	30	7	SMA	3	5	3	4	5	5	5	30
11	Laki-laki	33	8	Sarjana	4	5	4	3	5	4	4	31
12	Perempuan	23	5	SMA	5	5	5	5	5	4	5	34
13	Laki-laki	42	15	Sarjana	4	4	4	4	4	4	4	28
14	Laki-laki	30	6	Diploma	5	4	5	4	5	4	5	32
15	Perempuan	43	13	SMA	4	4	4	4	4	4	4	28
16	Perempuan	32	8	Sarjana	5	5	5	5	5	4	5	34
17	Perempuan	37	12	Sarjana	4	5	4	5	4	4	4	30
18	Laki-laki	32	7	Sarjana	4	5	4	5	3	5	4	30
19	Laki-laki	39	10	Sarjana	4	4	4	4	5	5	4	30
20	Perempuan	30	5	SMA	5	5	5	5	4	4	5	33
21	Perempuan	28	5	Sarjana	4	4	4	4	3	5	4	28
22	Perempuan	24	3	SMA	5	5	5	5	3	4	5	32
23	Laki-laki	44	19	SMA	5	5	5	5	3	5	5	33
24	Laki-laki	43	22	SMA	5	4	5	4	5	5	5	53
25	Laki-laki	33	8	Sarjana	5	4	5	5	5	4	5	33
26	Perempuan	41	19	SMA	5	5	5	5	5	4	5	34
27	Laki-laki	49	24	SMA	5	3	5	5	5	5	5	32
28	Laki-laki	36	9	SMA	5	4	5	5	5	5	5	34
29	Laki-laki	34	9	SMA	5	5	5	5	4	5	5	34
30	Perempuan	29	5	Sarjana	5	4	5	5	5	5	5	34
31	Laki-laki	36	10	Sarjana	5	5	5	5	4	5	5	34
32	Laki-laki	57	28	Sarjana	5	5	5	4	5	3	5	32
33	Laki-laki	31	7	Sarjana	4	5	4	5	5	5	5	33